



LAPORAN KINERJA

APBD TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINASTANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Penetapan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan wujud komitmen Kepala Dinas beserta seluruh aparatur lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan sistem akuntabilitas dan pertanggungjawaban program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan dan strategi pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran terwujudnya visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat di Provinsi Kalimantan Barat.

Sepanjang tahun 2021 dan sampai saat ini, seluruh dunia mengalami masa pandemi akibat merebaknya wabah virus *covid-19*, termasuk wilayah Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Barat pada khususnya. Dalam upaya mengantisipasi sebaran dan penanggulangan virus corona (*covid-19*), pemerintah pusat dan daerah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM dan upaya penanggulangan *covid-19* sangat berpengaruh pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi dan capaian target kinerja.



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Kami menyadari Laporan Kinerja yang disusun belum sempurna menggambarkan akuntabilitas kinerja yang ideal, masih memerlukan penyempurnaan, dan perbaikan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya kami terus berupaya menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja pada masa yang akan datang.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja yang disusun ini dapat memberikan informasi dan data dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan kinerja organisasi dan aparatur. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin

Pontianak, Januari 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan.....	1
2. Susunan Organisasi	3
3. Tugas dan Fungsi.....	9
4. Sumber Daya Aparatur	28
5. Sumber Daya Keuangan	32
6. Sarana dan Prasarana	35
B. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	39
A. Rencana Strategis	39
1. Visi.....	41
2. Misi.....	43
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta IKU	44
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	51
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.....	52



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

a.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
b.	Analisis program/kegiatan/sub kegiatan menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	59
1)	Kinerja Sasaran Strategis Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	59
2)	Kinerja Sasaran Strategis Tanaman Hortikultura	96
2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	111
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2021 dengan Target Tahun 2022	114
4.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	118
5.	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target dan kinerja secara nasional	124
B.	Realisasi Anggaran	124
BAB IV	PENUTUP	133



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat



DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Lampiran 1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	137
Lampiran 2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	138



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak	28
Tabel 1.2 Data ASN dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	29
Tabel 1.3 Data ASN dan Tenaga Kontrak pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	30
Tabel 1.4 Data ASN dan Tenaga Kontrak pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat	31
Tabel 1.5 Data ASN dan Tenaga Kontrak pada UPT Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat	31
Tabel 1.6 Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2021	33
Tabel 1.7 Rincian Lahan Kebuh Benih Tanaman Pangan	36
Tabel 1.8 Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2021	37
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	47
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	48
Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	53
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021	57
Tabel 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta Capaian Indikator Program Pendukung Tahun 2021	62
Tabel 3.5 Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2020 dan ASEM Tahun 2021.....	65
Tabel 3.6 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Hortikultura	66



Tabel 3.7	Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	73
Tabel 3.8	Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	88
Tabel 3.9	Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Indeks yang diterima oleh Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta Capaian Indikator Program Pendukung Tahun 2021	98
Tabel 3.11	Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyuluh Pertanian	103
Tabel 3.12	Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Perizinan Usaha Pertanian	110
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB	111
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Produksi Tanaman Pangan	112
Tabel 3.15	Perbandingan Produktivitas dan Luas Panen Padi dan Jagung	112
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Produksi Hortikultura	113
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Indeks yang diterima petani	114
Tabel 3.18	Perbandingan Rata-rata Capaian NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019-2021 Dengan Target Tahun 2022	114



Tabel 3.19	Perbandingan Rata-rata Capaian Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019-2020 dengan Target Tahun 2022	116
Tabel 3.20	Perbandingan Rata-rata Capaian Produksi Hortikultura Tahun 2019-2020 dengan Target Tahun 2022	117
Tabel 3.21	Perbandingan Rata-rata Capaian Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2019-2020 dan Target Tahun 2022	118
Tabel 3.22	Pagu dan Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan Corebusiness Tahun Anggaran 2021	125



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	5
Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	6
Gambar 1.3 Struktur Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat	7
Gambar 1.4 Struktur Organisasi UPT Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat	8
Gambar 1.5 Grafik Perbandingan Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak	29
Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Capaian NTP Tanaman Pangan dan NTP Hortikultura Tahun 2021.....	55
Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021.....	55
Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB 5 Tahun Terakhir	56
Gambar 3.4 Grafik Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021	58
Gambar 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan	60
Gambar 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Hortikultura	60
Gambar 3.7 Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali atau lebih	84
Gambar 3.8 Indeks yang diterima petani	96
Gambar 3.9 Indeks yang diterima petani berdasarkan sub sektor	97



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan *good governance* memerlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ditetapkan berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019 dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Sementara yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Sedangkan yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan



hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan, mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan telah diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja) disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pada akhir tahun anggaran setiap instansi diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi. Sementara itu di lingkungan



Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat telah membuat Perencanaan Strategis yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021. Realisasi capaian kinerja sebagai hasil pelaksanaan perencanaan strategis dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021. Evaluasi terhadap capaian kinerja dimaksudkan untuk:

- memberikan informasi capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
- memberikan bahan evaluasi sebagai bahan masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat serta kontribusi dan keterkaitannya terhadap implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat; dan
- peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Produk lanjutan dari peraturan daerah tersebut diterbitkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang



Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 6 Mei 2021.

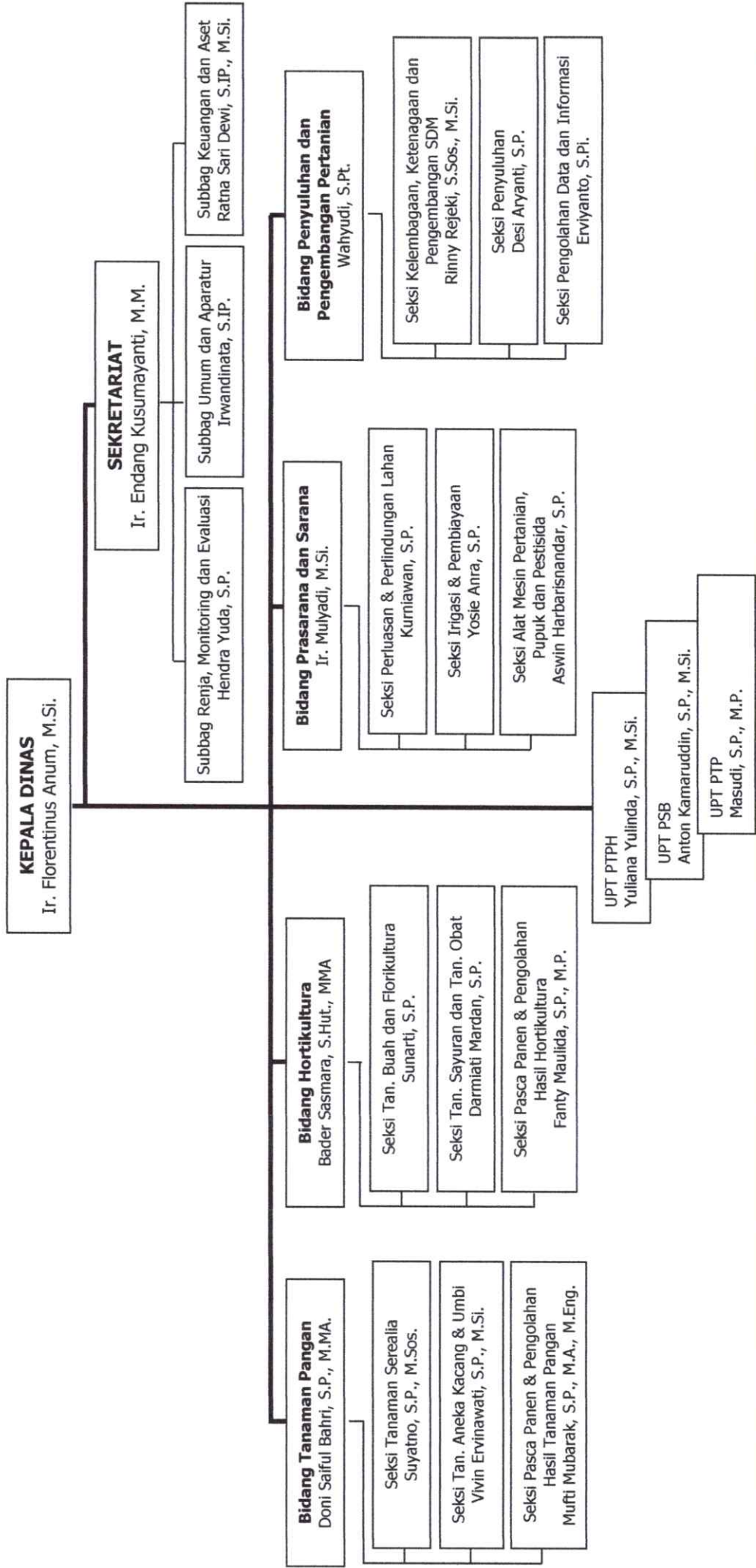
Adapun Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Tanaman Pangan;
4. Bidang Hortikultura;
5. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
6. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian; dan
7. Unit Pelaksana Teknis



Gambar 1.1

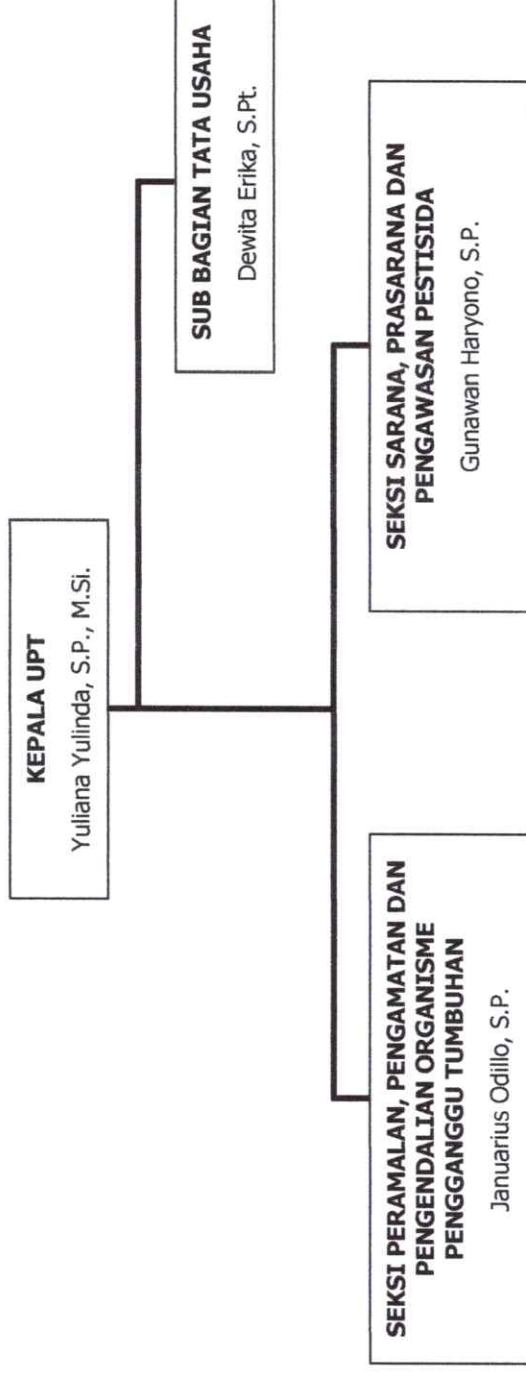
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2021**





Gambar 1.2

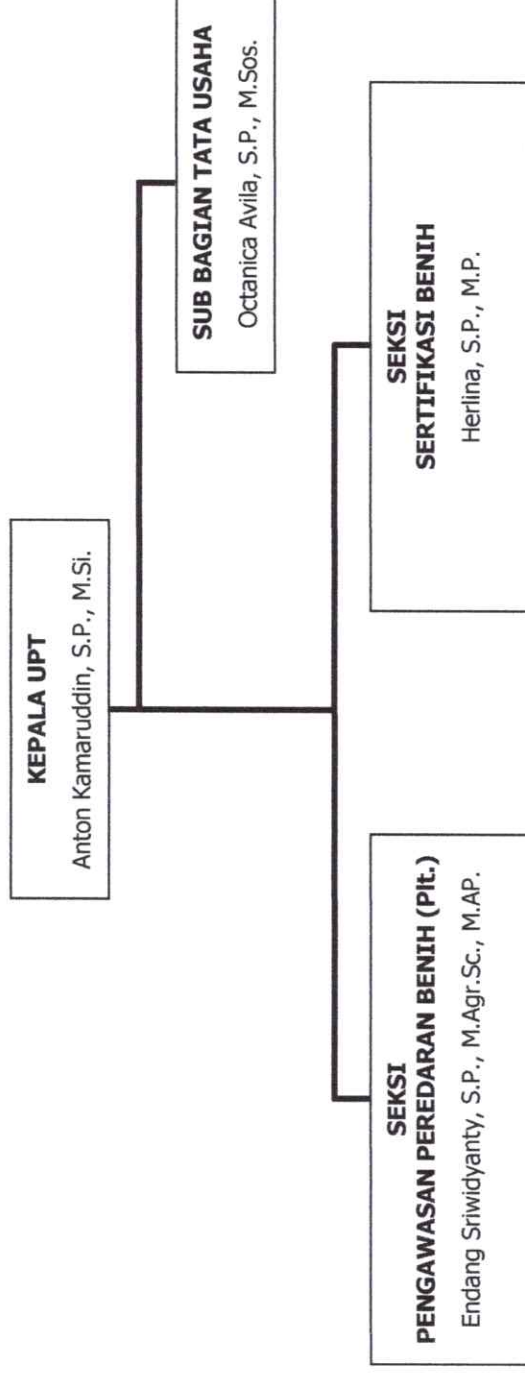
**STRUKTUR ORGANISASI UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 64 TAHUN 2021**





Gambar 1.3

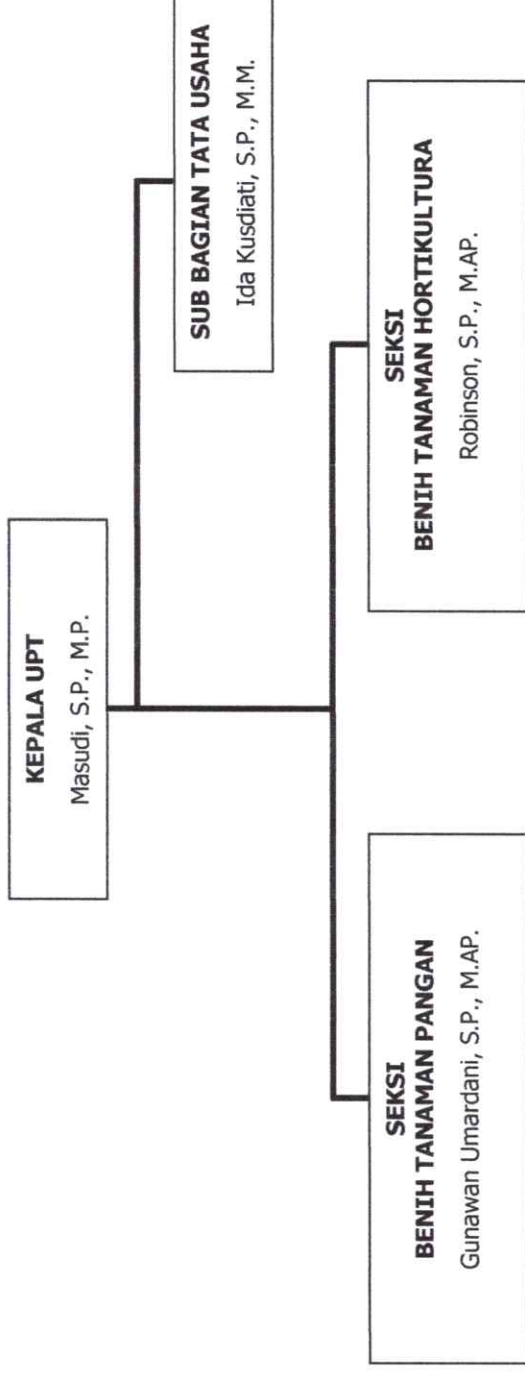
**STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 70 TAHUN 2021**





Gambar 1.4

**STRUKTUR ORGANISASI UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 101 TAHUN 2021**





3. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

➤ *Tugas*

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

➤ *Fungsi*

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki fungsi:

- a. perumusan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan



- pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
 - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
 - h. pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang menjadi uraian tugas dan fungsi pada Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1) KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan dinas di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:



- a. penetapan program kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- c. penyelenggaraan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- e. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan dan pengembangan pertanian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2) SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;



- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:

- a) Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
- b) Sub Bagian Umum dan Aparatur; dan
- c) Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3) BIDANG TANAMAN PANGAN

Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman sereal, tanaman aneka kacang dan umbi, pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang tanaman pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Tanaman Pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman sereal, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanaman sereal, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman serealia, tanaman aneka kacang dan umbi, serta pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a) Seksi Tanaman Serealia;
- b) Seksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; dan
- c) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.



4) BIDANG HORTIKULTURA

Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hortikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat, pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang hortikultura. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Hortikultura;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat, serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat, serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang tanaman buah dan florikultura, tanaman sayuran dan tanaman obat serta pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a) Seksi Tanaman Buah dan Florikultura;
- b) Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat; dan
- c) Seksi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura.

5) BIDANG PRASARANA DAN SARANA

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana dan Sarana bertugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang prasarana dan sarana. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi:



- a. penyusunan program kerja Bidang Prasarana dan Sarana;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perluasan dan perlindungan lahan, irigasi bidang pertanian dan pembiayaan, serta alat mesin pertanian, pupuk dan pestisida; dan



- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang prasarana dan sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a) Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan;
- b) Seksi Irigasi dan Pembiayaan; dan
- c) Seksi Alat Mesin Pertanian, Pupuk dan Pestisida.

6) BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penyuluhan dan pengembangan pertanian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan, ketenagaan dan pengembangan sumber daya manusia, penyuluhan, pengolahan data dan informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penyuluhan dan pengembangan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a) Seksi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b) Seksi Penyuluhan; dan
- c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.



7) UNIT PELAKSANA TEKNIS

a. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTTPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 84 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 6 Mei 2021.

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengamatan, penetapan diagnosis dan penyebaran informasi OPT;



- e. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang peramalan, pengamatan dan pengendalian OPT secara spesifik;
- f. penyelenggaraan sarana, prasarana dan teknis operasional pengawasan pestisida;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi 3 (tiga) sub bagian/seksi, yaitu:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
- c) Seksi Sarana, Prasarana dan Pengawasan Pestisida.

b. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih (UPTPSB) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 85 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 6 Mei 2021.

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional



di bidang pengawasan dan sertifikasi benih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kultivar dan laboratorium;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang pengawasan dan sertifikasi benih yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih membawahi 3 (tiga) sub bagian/seksi, yaitu:

- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih; dan
- c) Seksi Sertifikasi Benih.

c. UPT Pembenuhan Tanaman Pangan

UPT Pembenuhan Tanaman Pangan (UPTPTP) dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2017



tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat dan berlaku sejak diundangkan pada tanggal 21 Juni 2021 dimana perubahan kedua peraturan gubernur ini berisi perubahan fungsi sebagai akibat dihapusnya UPT Balai Benih Induk Hortikultura.

UPT Pembenihan Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

UPT Pembenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang pembenihan tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, UPT Pembenihan Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman Pangan;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Pembenihan Tanaman Pangan;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pembenihan tanaman pangan;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih serealia;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih aneka kacang dan umbi;
- f. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP);



- g. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyebarluasan (penyaluran) Benih Dasar dan Benih Pokok kepada produsen benih;
- h. pelaksanaan kegiatan teknis observasi penerapan teknologi perbenihan, baik teknologi produksi maupun pasca panen;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemurnian kembali varietas unggul;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis kepada produsen benih;
- k. pelaksanaan pemantauan internal mutu benih;
- l. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyebarluasan informasi perbenihan;
- m. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang benih hortikultura, perbenihan tanaman sayuran dan obat, perbenihan tanaman buah dan florikultura;
- n. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang balai benih induk hortikultura;
- o. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang perbenihan tanaman sayuran dan obat;
- p. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tanaman buah dan florikultura;
- q. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pembenihan tanaman pangan dan benih induk hortikultura; dan
- r. pelaksanaan tugas lain di bidang pembenihan tanaman pangan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

UPT Pembenihan Tanaman Pangan membawahi 3 (tiga) sub bagian/seksi, yaitu:



- a) Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Seksi Benih Tanaman Pangan; dan
- c) Seksi Benih Tanaman Hortikultura.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, maka sejak bulan Januari 2022 UPT Pembenihan Tanaman Pangan dihapuskan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 192 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembenihan Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Barat. Sementara untuk tugas dan fungsinya akan dialihkan ke UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih terhitung tahun 2022.

d. UPT Balai Benih Induk Hortikultura

UPT Balai Benih Induk Hortikultura (UPTBBIH) dicabut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Induk Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Juni 2021. Agar target kinerja program dan kegiatan teknis tetap terpenuhi, tugas dan fungsi eks UPTBBIH



digabung dengan UPT Pembenihan Tanaman Pangan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2021 termasuk seluruh pegawai, aset dan sisa anggaran sebelumnya.

e. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian (UPT Diklat Pertanian) dicabut dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 97 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 83 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 63 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Provinsi Kalimantan Barat yang berlaku sejak diundangkan tanggal 21 Juni 2021. Agar target kinerja program dan kegiatan teknis tetap terpenuhi, tugas dan fungsi eks UPT Diklat Pertanian digabung dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang pengelolaannya di bawah Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian.

8) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Adapun kedudukan dan tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional



berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Jabatan Fungsional yang ada di lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebelum tanggal 16 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- 2) Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT);
- 3) Penyuluh Pertanian;
- 4) Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);
- 5) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian; dan
- 6) Analisis Kepegawaian.

Namun, sejak tanggal 16 Agustus 2021, semua jabatan fungsional lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat berubah statusnya menjadi jabatan pelaksana sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat berikut ini:

- 1) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 824/85/BKD-C tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 824/87/BKD-C tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat; dan



- 3) Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 824/88/BKD-C tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

4. SUMBER DAYA APARATUR

Suatu organisasi untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sampai akhir tahun 2021 adalah 364 orang dengan rincian 258 orang ASN dan 106 orang Tenaga Kontrak.

Adapun rincian jumlah ASN dan Tenaga Kontrak berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta eselonering pada lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	31	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	Esselon II/a	1
2.	S1	114	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	Esselon III/a	5
3.	Diploma IV	1	Pembina Tingkat I (IV/b)	7	Esselon III/b	3
4.	Diploma III	17	Pembina (IV/a)	16	Esselon IV/a	24
5.	Diploma I	1	Penata Tingkat I (III/d)	75	Pelaksana	225
6.	SLTA Kejuruan	50	Penata (III/c)	35		
7.	SLTA Umum	40	Penata Muda Tingkat I (III/b)	34		
8.	SLTP Kejuruan	1	Penata Muda (III/a)	24		
9.	SLTP Umum	3	Pengatur Tingkat I (II/d)	37		
10.			Pengatur (II/c)	18		
11.			Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	5		
12.			Pengatur Muda (II/a)	4		
Jumlah		258		258		258
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	36				
2.	Diploma III	4				
3.	SLTA Kejuruan	43				

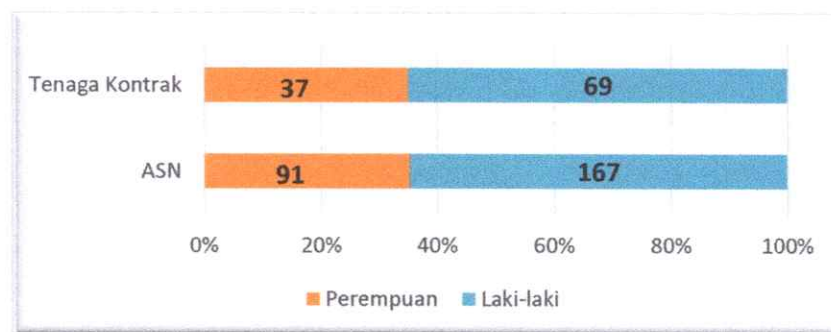


NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
4.	SLTA Umum	16				
5.	SLTP Kejuruan	1				
6.	SLTP Umum	1				
7.	SD	3				
Jumlah		106				
TOTAL		364				

Sumber : Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) per 30 Desember 2021 dan SK Tenaga Kontrak Tahun 2021

Perbandingan jumlah ASN dan Tenaga Kontrak berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.5 Grafik Perbandingan Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak



Secara rinci data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan UPT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	22	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	Esselon II/a	1
2.	S1	58	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Esselon III/a	5
3.	Diploma IV	1	Pembina Tingkat I (IV/b)	7	Esselon IV/a	15
4.	Diploma III	11	Pembina (IV/a)	7	Pelaksana	98
5.	SLTA Kejuruan	10	Penata Tingkat I (III/d)	35		
6.	SLTA Umum	17	Penata (III/c)	13		
7.			Penata Muda Tingkat I (III/b)	21		



NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
8.			Penata Muda (III/a)	9		
9.			Pengatur Tingkat I (II/d)	14		
10.			Pengatur (II/c)	8		
11.			Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	3		
Jumlah		119		119		119
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	26				
2.	Diploma III	4				
3.	SLTA Kejuruan	21				
4.	SLTA Umum	8				
5.	SLTP Kejuruan	1				
6.	SLTP Umum	0				
7.	SD	1				
Jumlah		61				
TOTAL		180				

Jumlah ASN sebanyak 119 orang terdiri 68 orang laki-laki dan 51 orang perempuan, sedangkan jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 61 orang terdiri dari 41 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

Tabel 1.3 Data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kalbar

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	1	Pembina (IV/a)	4	Esselon III/b	1
2.	S1	33	Penata Tingkat I (III/d)	28	Esselon IV/a	3
3.	Diploma III	2	Penata (III/c)	12	Pelaksana	69
4.	Diploma I	1	Penata Muda Tingkat I (III/b)	6		
5.	SLTA Kejuruan	29	Penata Muda (III/a)	11		
6.	SLTA Umum	7	Pengatur Tingkat I (II/d)	9		
7.			Pengatur (II/c)	2		
8.			Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1		
Jumlah		73		73		73
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	7				
2.	SLTA Kejuruan	2				
3.	SLTA Umum	1				
4.	SLTP Umum	1				
Jumlah		11				
TOTAL		84				



Jumlah ASN sebanyak 73 orang terdiri 55 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, sedangkan jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 11 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Tabel 1.4 Data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Prov. Kalbar

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	4	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Esselon III/b	1
2.	S1	22	Pembina (IV/a)	2	Esselon IV/a	3
3.	Diploma III	1	Penata Tingkat I (III/d)	12	Pelaksana	31
4.	SLTA Kejuruan	5	Penata (III/c)	9		
5.	SLTA Umum	3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3		
6.			Penata Muda (III/a)	3		
7.			Pengatur Tingkat I (II/d)	4		
8.			Pengatur (II/c)	1		
Jumlah		35		35		35
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	1				
2.	SLTA Kejuruan	4				
3.	SLTA Umum	1				
Jumlah		6				
TOTAL		41				

Jumlah ASN sebanyak 35 orang terdiri 18 orang laki-laki dan 17 orang perempuan, sedangkan jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 6 orang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Tabel 1.5 Data Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak pada UPT Pembenihan Tanaman Pangan Prov. Kalbar

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
APARATUR SIPIL NEGARA						
1.	S2	4	Pembina (IV/a)	3	Esselon III/b	1
2.	S1	1	Penata (III/c)	1	Esselon IV/a	3
3.	Diploma III	3	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	Pelaksana	27
4.	SLTA Kejuruan	6	Penata Muda (III/a)	1		
5.	SLTA Umum	13	Pengatur Tingkat I (II/d)	10		
6.	SLTP Kejuruan	1	Pengatur (II/c)	7		
7.	SLTP Umum	3	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1		
8.			Pengatur Muda (II/a)	4		
Jumlah		31		31		31



NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JUMLAH PERSONIL	ESELON	JUMLAH PERSONIL
TENAGA KONTRAK						
1.	S1	4				
2.	SLTA Kejuruan	16				
3.	SLTA Umum	6				
4.	SD	2				
Jumlah		28				
TOTAL		59				

Jumlah ASN sebanyak 31 orang terdiri 26 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, sedangkan jumlah Tenaga Kontrak sebanyak 28 orang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Pada awal tahun anggaran 2021 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan alokasi APBD sebesar Rp 58.090.188.455 berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2021 Tanggal 4 Januari 2021 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 57.986.017.190 dan belanja modal sebesar Rp 104.171.265. Namun dalam proses pelaksanaan terjadi perubahan dan penyempurnaan dokumen anggaran terutama sebagai akibat terjadinya pandemi *covid-19* sehingga pagu anggaran perubahan yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebesar Rp 36.418.189.470 berdasarkan DPA-SKPD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.03.0000/002/ 2021 Tanggal 5 November 2021 terdiri dari belanja operasi saja sebesar Rp 36.418.189.470. Sedangkan belanja lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi program/kegiatan *corebusiness* sebesar Rp 13.295.934.270 dengan rincian program sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Alokasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan APBD Tahun 2021**

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
OPD DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR		49.714.123.740
	<i>Belanja Operasi</i>	40.600.117.895
	<i>Belanja Modal</i>	9.114.005.845
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR		36.418.189.470
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.592.080.754
1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.458.321
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.275.233.816
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	76.688.000
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.236.770
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	423.759.994
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.922.804.215
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.899.638
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.791.372.345
1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	77.944.925
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.713.427.420
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.062.573.465
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	6.062.573.465
07	Program Penyuluhan Pertanian	2.972.162.906
1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	917.430.600
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1.899.272.306
1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	155.460.000
UPT Pembenihan Tanaman Pangan		11.277.815.542
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.095.588.246
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.778.125
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	68.601.391
1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.787.270
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.541.750
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.303.349
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	368.350.040
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359.787.721
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.438.600
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.338.065.196
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.338.065.196
03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	8.844.162.100
1.01	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	8.844.162.100



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

NO	DINAS/UPT/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)
UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura		1.161.676.734
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	777.904.538
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.844.260
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	103.421.630
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.250.000
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.616.818
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.749.640
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	412.229.490
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.792.700
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.266.300
1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.266.300
05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	378.505.896
1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	378.505.896
UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih		856.441.994
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	560.691.544
1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.340.470
1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.700.265
1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.444.796
1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.647.072
1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.415.000
1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	264.793.941
1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.350.000
02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	176.488.308
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	170.966.792
1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	5.521.516
06	Program Perizinan Usaha Pertanian	79.847.207
1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.847.207
07	Program Penyuluhan Pertanian	39.414.935
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	39.414.935

Sumber : DPA-APBD Perubahan lingkup Dinas dan UPT Tahun 2021



6. SARANA DAN PRASARANA

Salah satu sumberdaya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- Gedung kantor utama, terletak di Jalan Aliyang Nomor 17 Pontianak, dengan kondisi yang sangat baik dan fasilitas yang cukup. Adapun gedung kantor UPT yang ada di Kota Pontianak antara lain UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan UPT Pengawasan Sertifikasi Benih yang terletak di Jalan Aliyang Gang Kurnia serta gedung kantor eks UPT Terminal Agribisnis Terpadu yang terletak di Jalan Khatulistiwa KM 5 Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara. Untuk gedung kantor UPT yang berada di luar wilayah Kota Pontianak adalah eks UPT Balai Benih Induk Hortikultura dan eks UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian yang terletak di Anjungan serta UPT Pembenihan Tanaman Pangan yang terletak di Peniraman.
- Jaringan komunikasi melalui telepon nomor (0561) 734017 dan faximile (0561) 737069 sedangkan untuk jaringan internet bisa melalui alamat email distan@kalbarprov.go.id dan web <http://www.distan.kalbarprov.go.id>.
- Laboratorium terdiri dari 5 unit antara lain Laboratorium Mutu Benih yang ada di UPT Pengawasan Sertifikasi Benih, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit yang berada di bawah naungan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terletak di Sambas, Pontianak dan Singkawang, serta Laboratorium Kultur Jaringan yang terletak di Anjungan.
- Kebun benih tanaman pangan yang dimiliki seluas 83,9 Ha dimana pengelolaannya berada di bawah UPT Pembenihan Tanaman Pangan, dengan rincian seperti pada tabel berikut:



Tabel 1.7 Rincian Lahan Kebuh Benih Tanaman Pangan

No	Lokasi	Komoditas	Luas lahan (Ha)	
			Potensi	Produktif
1	Kebun Peniraman	Padi	15,2	10
2	Kebun Sui Kakap	Padi	12	8
3	Kebun Samalantan	Padi/Jagung	12	8
4	Kebun Merowi	Jagung	6	4
5	Kebun Paoh	Jagung/Palawija	20	7,5
6	Kebun Kulor	(digarap petani)	10	0
7	Kebung Mt. Segantar	Padi/Jagung	8,7	7,5
Total			83,9	45

- Prasarana dan sarana pembibitan tanaman hortikultura terdiri dari blok pondasi sebanyak 3 (tiga) unit, blok pondasi mata tempel (BPMT) sebanyak 4 (empat) unit, gedung kantor BF seluas 40 m², *pre-nursery* seluas 126 m², *nursery* seluas 80 m², *seeding net* seluas 540 m², sarana pembibitan seluas 1.093 m², *screen* anggrek seluas 120 m², *seeding net* tanaman *nephentehes* dan tanaman hias masing-masing seluas 40 m² dan 120 m², *screen* tanaman hias seluas 94 m² yang berlokasi di Anjungan dimana sejak UPT BBIH dihapuskan, pengelolaan asetnya berpindah di bawah UPT Pembenihan Tanaman Pangan.
- Kebun Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terletak di area Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai media/kebun *display* baik hortikultura maupun tanaman pangan seluas kurang lebih 0,75 Ha.
- Berdasarkan Data Aset/Barang Milik Daerah, maka sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.8 Rekapitulasi Barang Milik Daerah Tahun 2021**

No	Kode	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1.	1.3.1.01	Tanah	32
2.	1.3.2	Peralatan dan Mesin	
	1.3.2.01	• Alat Besar	47
	1.3.2.02	• Alat Angkutan	37
	1.3.2.03	• Alat Bengkel dan Alat Ukur	35
	1.3.2.04	• Alat Pertanian	3.040
	1.3.2.05	• Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.139
	1.3.2.06	• Alat Studio Dan Komunikasi dan Pemancar	99
	1.3.2.08	• Alat Laboratorium	61
	1.3.2.09	• Alat Persenjataan	37
3.	1.3.3	Gedung dan Bangunan	
	1.3.3.01	• Gedung	113
No	Kode	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
4.	1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
	1.3.4.01	• Jalan dan Jembatan	19
	1.3.4.02	• Bangunan air	52
	1.3.4.03	• Instalasi	5
	1.3.4.04	• Jaringan	7
5.	1.3.5	Aset tetap lainnya	
	1.3.5.01	Buku Perpustakaan	2.249
	1.3.5.02	Barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga	2
	1.3.5.05	Tanaman	64
TOTAL			10.038

Sumber: Data Aset/BMD Dinas TPH Prov. Kalbar, 2021



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/keadaan atau kejadian penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Isu-isu strategis bidang tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Tingkat kesejahteraan petani tanaman pangan cenderung belum optimal;
2. Produksi, mutu dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang belum optimal;
3. Kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air yang belum merata;
4. Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
5. Ketersediaan dan penggunaan benih unggul bersertifikat belum optimal;
6. Penerapan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan belum optimal;
7. Kemampuan sumber daya manusia pertanian belum optimal;
8. Pemberdayaan kelembagaan petani dan penyuluhan belum optimal;
9. Kualitas dan kontinuitas produk tanaman pangan dan hortikultura belum standar dalam menghadapi persaingan global;
10. Belum optimalnya system pemasaran dan penanganan pascapanen (Agribisnis); dan
11. Ancaman alih fungsi lahan pertanian.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sektor pertanian merupakan salah satu urusan pilihan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Dalam RPJMD Kalimantan Barat, selain dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian juga dibahas mendalam terkait dengan kesejahteraan petani (Nilai Tukar Petani). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat tahun 2018-2023 sebagai dokumen operasional penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah serta program pembangunan perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang berlaku sejak tanggal 8 Februari 2021. Penyusunan RPJMD dimulai melalui proses penyusunan Rancangan Teknokratik yang dilakukan oleh BAPPEDA Kalimantan Barat dengan melibatkan para ahli (akademisi), praktisi, pejabat pemerintah daerah, dan *stakeholders* pembangunan lainnya. Rancangan Teknokratik tersebut kemudian diselaraskan dengan visi dan misi Kepala



Daerah terpilih sehingga menghasilkan suatu Rancangan Awal RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* pembangunan secara luas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Masukan atau saran yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi dokumen RPJMD yang definitif untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat melakukan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sejalan dengan proses penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD dan bersifat indikatif. Rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) paling lambat minimal 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun



2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang berlaku sejak tanggal 2 Maret 2021.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah. Dengan berpedoman pada RKPD, Renja OPD disusun dan memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra dan Renja dilaksanakan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran Renstra selama 5 (lima) tahun dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dijadikan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun yang nantinya disahkan oleh DPRD menjadi APBD.

1. VISI

Masa jabatan Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa Visi Pembangunan Jangka Panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah **“Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”**. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018-2023, yaitu:



TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau dan lain-lain. Bersamaan dengan itu juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.



2. MISI

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur** yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*** yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif** yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai



keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera** yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib** yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan** yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. TUJUAN

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan. Tujuan dan sasaran menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu



strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mengemban misi ke-2 dan misi ke-4. Bersama-sama dengan seluruh instansi yang ada di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewajiban untuk mencapai misi ke-2 yaitu **"mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*"**. Tujuan dari misi ke-2 ini adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Misi ke-2 dilaksanakan melalui peningkatan kualitas aparatur secara moral dan intelektual agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-2 ini antara lain indeks reformasi birokrasi dan nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun yang menjadi misi ke-4 yaitu **"mewujudkan masyarakat sejahtera"**. Tujuan dari misi ini adalah meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sasaran yang ingin dicapai dari misi ini adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kesenjangan, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan serta meningkatnya kemandirian desa. Tujuan dan sasaran dari misi ke-4 menjadi target kinerja beberapa perangkat daerah termasuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis masing-masing.



Sesuai dengan tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura memuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjadi kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian tujuan dan sasaran dalam Renstra memiliki keterkaitan dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang ada dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Kontribusi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat terutama terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat tani. Oleh karena itu, ditetapkan tujuan menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu:

- **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi subsektor tanaman pangan dan hortikultura dan kesejahteraan petani.**

b. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Indikator kinerja sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka turut mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.



Adapun yang menjadi sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani” pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura antara lain:

1. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
2. Meningkatkan pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura.

Selanjutnya dari tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target kinerja tahun 2021 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Target Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran (Perubahan)	Keterangan
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	3,94	4,13 - 4,81	Indikator Tujuan pada Dokumen Renstra (Perubahan)
			Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	9,72	6,42 - 8,68	
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	97,03	95,11	
			NTP Hortikultura	102,13	101,40	
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	2.154.570	1.619.100	Indikator Sasaran pada Dokumen Renstra (Perubahan)
			Rincian:			
			Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.733.635	1.119.520	
			- Padi	1.568.000	873.500	
			- Jagung	164.900	246.020	
			- Kedelai	735	-	
			Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	420.935	499.580	
			- Tanaman Buah	362.450	423.650	
			- Tanaman Sayuran	44.800	51.500	
- Tanaman Biofarmaka	13.685	-				
- Tanaman Obat	-	24.430				
Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	NA	102,37	Indikator Sasaran pada Dokumen Renstra (Perubahan)		

**B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten.

Dokumen Perjanjian Kinerja (Lampiran 2) merupakan perjanjian tertulis antara Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran terhadap Kepala Daerah/Gubernur untuk menyelenggarakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan sasaran dan indikator yang telah disepakati bersama. Adapun Perjanjian Kinerja beserta anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	1.619.100 Ton
		- Jumlah produksi tanaman pangan	1.119.250 Ton
		- Jumlah produksi tanaman hortikultura	499.580 Ton
2	Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,37



Program	Anggaran
A. APBN	Rp 87.459.983.000
1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 4.193.723.000
2. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 72.050.929.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp 4.096.705.000
4. Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	Rp 7.118.626.000
B. APBD	Rp 42.911.972.821
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 3.791.372.345
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 6.602.573.465
3. Program Penyuluhan Pertanian	Rp 2.972.162.906
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 378.505.896
5. Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 79.847.207
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 29.627.511.002
TOTAL	Rp 130.371.955.821



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Perbaikan sistem dan manajemen pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang telah, sedang dan terus dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Komponen SAKIP diantaranya adalah perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Akuntabel secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap program dan kegiatan dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.



Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa pelaksanaan anggaran harus berbasis kinerja. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam:

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja pada intinya adalah menyajikan pengukuran capaian perjanjian kinerja, evaluasi dan analisa kinerja yang telah dilakukan. Laporan Kinerja memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagaimana telah dituangkan dalam sasaran program/kegiatan/sub kegiatan serta keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan perjanjian kinerja selanjutnya dibuat capaian kinerja. Capaian kinerja dibuat dengan melakukan pengukuran kinerja, yaitu dengan cara membandingkan rencana/target yang telah diperjanjikan dengan realisasinya. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan



berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran tahun berjalan dengan masing-masing indikator kerjanya terutama indikator kinerja utama. Elemen pengukuran kinerja terdiri dari kerangka pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang. Sedangkan analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan/sub kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan yang telah ditetapkan. Pada bab Akuntabilitas Kinerja akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai yang tercantum pada dokumen perencanaan. Adapun hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Formulir Pengukuran Kinerja (Lampiran 1). Pada bagian selanjutnya akan dipaparkan evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dicapai pada tahun 2021 oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dari sasaran yang telah ditetapkan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Target dan realisasi capaian kinerja tahun 2021 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Target Kinerja Sasaran 2021 (Perubahan)	Realisasi Kinerja 2021	Persentase Capaian Target Kinerja 2021
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	4,13 - 4,81	-5,55	-134,38
			Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	6,42 - 8,68	1,92	29,91
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	95,11	94,17	99,01
			NTP Hortikultura	101,40	104,87	103,42
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.619.100	1.562.525	96,51
			Rincian:			
			Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.119.520	988.261	88,28
			- Padi	873.500	776.797	88,93
			- Jagung	246.020	211.464	85,95
			Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	499.580	574.264	114,95
			- Tanaman Buah	423.650	494.321	116,68
			- Tanaman Sayuran	51.500	59.720	115,96
		- Tanaman Obat	24.430	20.223	82,78	
Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,37	106,38	103,92		
Rata-rata Capaian Kinerja						49,73

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Hasil Analisis)

Keterangan : Laju Pertumbuhan PDRB menggunakan angka sangat sementara

Sebagaimana diketahui bahwa sepanjang tahun 2021 dan hingga saat ini masih terjadi pandemi covid-19 (terakhir varian omicron) yang sangat berdampak pada perekonomian. Pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami kontraksi, termasuk di Kalimantan Barat. Hal demikian juga terjadi pada capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang mengalami penurunan.

Dari Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 rata-rata capaian kinerja adalah sebesar 49.73%. Target NTP Tanaman Pangan dan Palawija pada tahun 2021 adalah sebesar 95,11 dan terealisasi hanya 94,17 (capaian kinerja 99,01%). Kondisi ini menggambarkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayarkan



petani. Artinya, pendapatan petani tanaman pangan mengalami penurunan. Sementara target NTP Hortikultura pada tahun 2021 adalah sebesar 101,40 dan terealisasi 104,87 (capaian kinerja 103,42). Kondisi ini menggambarkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayarkan petani. Dengan kata lain menunjukkan adanya peningkatan pendapatan petani karena hasil produksi yang diterima lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi.

Beberapa hal yang menyebabkan capaian NTP Tanaman Pangan dan NTP Hortikultura tidak memenuhi target diantaranya:

- Adanya fluktuasi harga dan ketersediaan stok barang dan jasa yang diperlukan petani untuk memproduksi hasil pertanian, misalnya pupuk dan benih. Saat petani memerlukan, tidak tersedia ataupun ada barang namun terbatas dan mahal.
- Adanya permintaan bahan pokok/pangan yang cenderung meningkat dibandingkan kebutuhan lain karena masa pandemi.
- Pergeseran jadwal tanam sehingga mempengaruhi panen dan ketersediaan hasil produksi (saat panen raya harga di tingkat petani turun)
- Distribusi hasil produksi pertanian ke lokasi pasar yang jauh, meningkatkan biaya angkut namun harga ditingkat petani tetap rendah.
- Tidak adanya jaminan harga pada saat terjadinya panen raya menyebabkan harga produk pertanian di tingkat petani menjadi rendah.

Upaya yang bisa dilakukan adalah memperbaiki rantai pemasaran yang ada di tingkat petani dengan menumbuhkan badan usaha pedesaan atau mengaktifkan koperasi-koperasi di tingkat desa untuk menampung produk pertanian. Selain itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk menjaga ketersediaan sarana produksi dan fasilitasi bantuan seperti benih dan pupuk sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan petani.

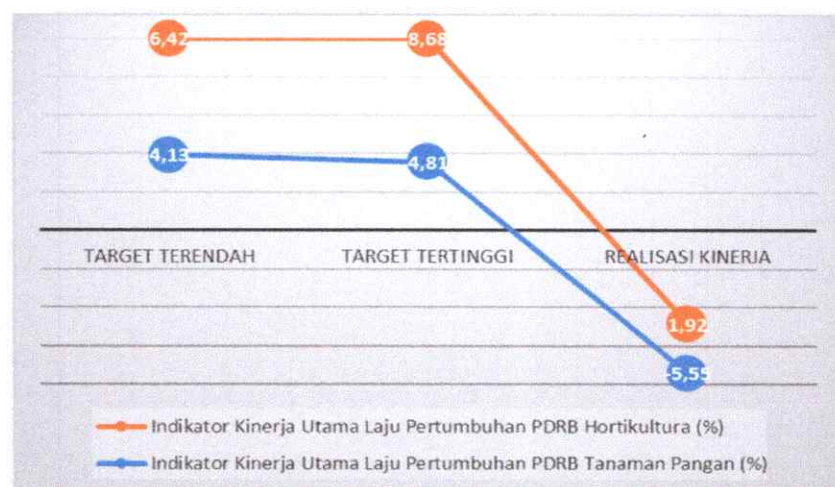


Gambar 3.1 Grafik Target dan Realisasi Capaian NTP Tanaman Pangan dan NTP Hortikultura Tahun 2021



Adapun target Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan tahun 2021 adalah sebesar 4,13%-4,81%, namun realisasi justru turun menjadi -5,55% (BPS, Angka Sangat Sementara) atau capaian kinerjanya sebesar -134,38% dari target terendah yang telah ditetapkan. Demikian pula untuk target Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura tahun 2021 adalah sebesar 6,42%-8,68%, namun realisasi turun menjadi 1,92% (BPS, Angka Sangat Sementara) atau capaian kinerja hanya sebesar 29,91% dari target terendah yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di bidang tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan sebagai dampak dari pandemi covid-19.

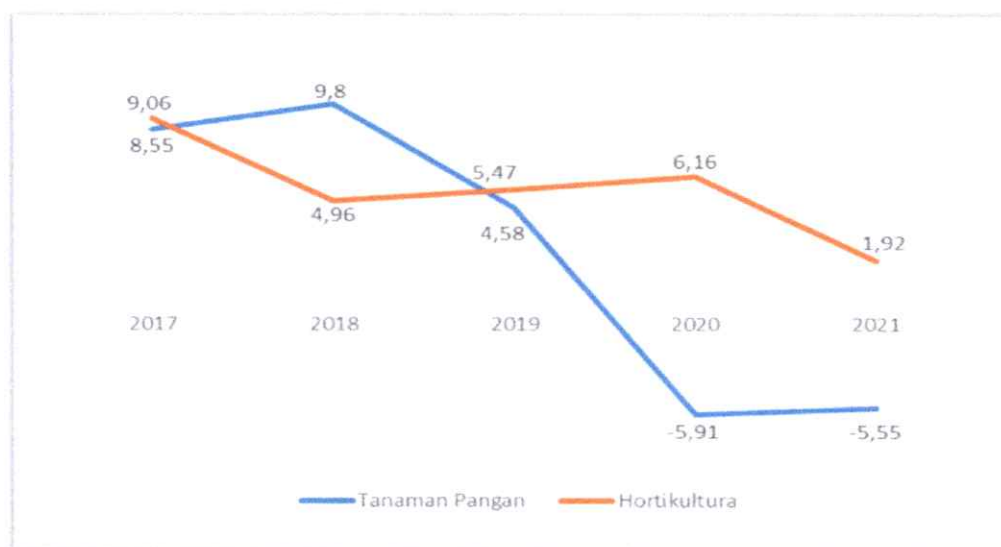
Gambar 3.2 Grafik Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021





Namun, angka Laju Pertumbuhan PDRB tersebut masih bersifat Angka Sangat Sementara berdasarkan data BPS dalam buku Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022 yang baru rilis pada tanggal 25 Februari 2022. Berikut grafik *time series* Laju Pertumbuhan PDRB dalam 5 tahun terakhir:

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB 5 Tahun Terakhir



Keterangan : Tahun 2021 merupakan Angka Sangat Sementara, Tahun 2020 menggunakan Angka Sementara

Jika melihat dibandingkan dengan tahun 2017-2019 yang sudah merupakan angka tetap, masih ada harapan angka Laju Pertumbuhan PDRB mengalami perubahan kenaikan dari keadaan saat ini.

Adapun untuk capaian kinerja Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 3.2 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	2021		% Capaian Kinerja
			Target Renstra Perubahan	Realisasi	
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.619.100	1.562.525	96,51
		Rincian:			
		Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.119.520	988.261	88,28
		- Padi	873.500	776.797	88,93
		- Jagung	246.020	211.464	85,95
		Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	499.580	574.264	114,95
		- Tanaman Buah	423.650	494.321	116,68
		- Tanaman Sayuran	51.500	59.720	115,96
- Tanaman Obat	24.430	20.223	82,78		

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, diolah, 2022

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat secara keseluruhan untuk jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura yang ditargetkan sebesar 1.619.100 ton, hanya terealisasi 1.562.525 ton (96,51%). Tidak tercapainya jumlah produksi bersumber dari tidak tercapainya jumlah produksi tanaman pangan (padi dan jagung) yang ditargetkan sebesar 1.119.520 ton, hanya terealisasi 988.261 ton (ASEM Padi 2021 dan ARAM Jagung 2021) atau hanya mencapai 88,28% dari target. Sedangkan jumlah produksi tanaman hortikultura mencapai target.

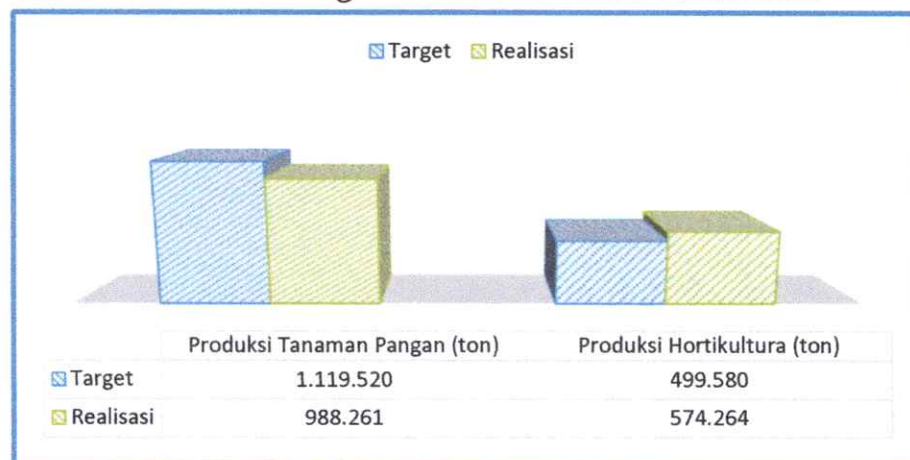
Penurunan produksi tanaman pangan disebabkan produksi semua komoditas tanaman pangan (padi dan jagung) juga mengalami penurunan. Target produksi padi sebesar 873.500 ton hanya terealisasi sebesar 776.797 ton (88,93%). Penurunan produksi padi ini disebabkan adanya penurunan luas panen padi sebesar 3.53% dari 256.575 ha (ATAP 2020) turun menjadi 247.510 ha (ASEM 2021). Meskipun luas panen menurun, produktivitas padi secara angka mengalami kenaikan sekitar 3,48% dibandingkan pada tahun 2020, namun tetap saja tidak bisa mempengaruhi kenaikan jumlah produksi padi. Sementara target produksi jagung sebesar



246.020 ton, hanya terealisasi sebesar 211.464 ton (85,95%). Sama halnya dengan padi, tidak tercapainya target produksi jagung disebabkan oleh luas panen jagung mengalami penurunan dari 53.428 ha (ATAP 2020) turun menjadi 43.919 ha (ARAM 2021).

Untuk produksi tanaman hortikultura, dapat dilihat bahwa target produksi hortikultura (buah, sayur, dan obat) tahun 2021 adalah sebesar 499.580 ton dan terealisasi 574.264 ton atau capaian kinerjanya 114,95% dari target. Tercapainya target kinerja produksi hortikultura tahun 2021 bersumber dari komoditas buah (116,68%) dan sayur (115,96%) saja. Sementara untuk komoditas obat, dari target yang ditetapkan sebesar 24.430 ton, hanya bisa terealisasi sebesar 20.223 ton atau hanya mencapai 82,78% dari target.

Gambar 3.4 Grafik Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021



Tidak tercapainya target kinerja produksi tanaman pangan tahun 2021 mengakibatkan tidak tercapai pula target kinerja NTP dan laju pertumbuhan PDRB tahun 2021. Sedangkan untuk produksi hortikultura, meskipun target kinerja tercapai, namun tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja NTP dan laju pertumbuhan PDRB. Kondisi ini disebabkan, meskipun produksi hortikultura tersedia, namun terkendala dalam hal pemasaran dan distribusinya.

**a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya diukur melalui perbandingan antara rata-rata capaian kinerja dengan realisasi pelaksanaan anggaran sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	5.311.192.149	5.159.962.712	97,15		
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.906.735.565	11.174.199.853	74,96		
		3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	378.505.896	368.951.413	97,48	49,73	
2	Meningkatnya Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Program Penyuluhan Pertanian	3.011.577.841	2.170.863.253	72,08		
		2. Program Perizinan Usaha Pertanian	79.847.207	54.211.107	67,89		
			23.687.858.658	18.928.188.338	79,91	49,73	

Sumber : Hasil pengolahan data, 2021

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran program *corebusiness* sebesar 79,91% dan rata-rata realisasi capaian kinerja sebesar 49,73%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masih belum efisien karena capaian kinerja masih di bawah 100%.

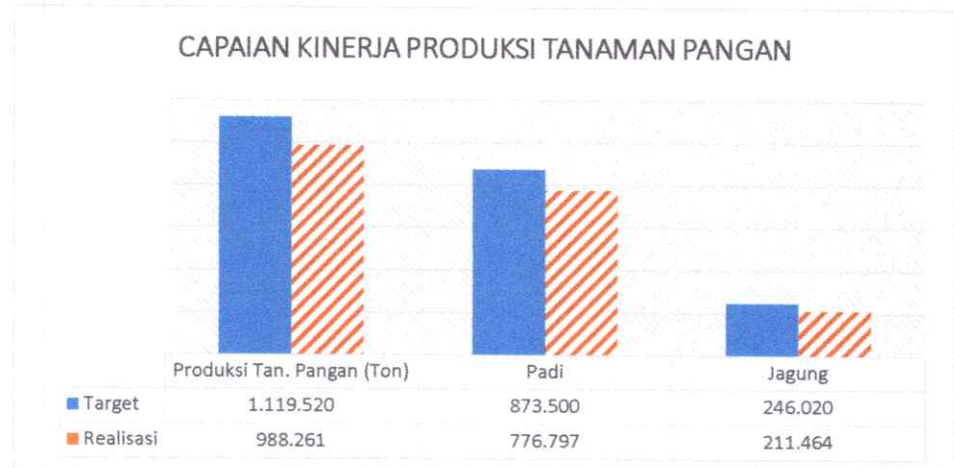
b. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**1) KINERJA SASARAN STRATEGIS PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Berdasarkan pengukuran kinerja, capaian kinerja produksi tanaman pangan tahun 2021 (Tabel 3.1) adalah sebesar 988.261 ton (88,28%). Dari 2 (dua) komoditas tanaman pangan, kinerja produksi yang paling rendah adalah jagung. Produksi jagung ditargetkan sebesar 246.020 ton, namun hanya terealisasi sebesar 211.464 ton



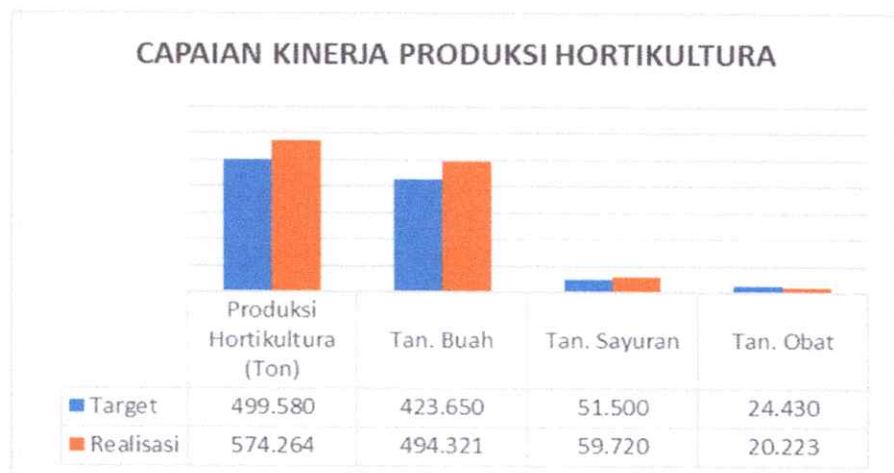
(85,95%), sedangkan produksi padi yang ditargetkan sebesar 873.500 ton, hanya terealisasi sebesar 776.797 ton (88,93%).

Gambar 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan



Capaian kinerja produksi hortikultura tahun 2021 (Tabel 3.1) adalah sebesar 574.264 ton (114,95%). Dari 3 (tiga) komoditas, kinerja produksi yang paling rendah adalah tanaman obat. Produksi tanaman obat ditargetkan sebesar 24.430 ton, namun hanya terealisasi sebesar 20.223 ton (82,78%).

Gambar 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Hortikultura





Selanjutnya hasil pengukuran kinerja (sasaran strategis) dapat dianalisis dan dikaitkan dengan indikator kinerja program pendukung secara berjenjang menjadi ukuran kinerja dari eselon 3.

Pencapaian kinerja tujuan/sasaran strategis produksi tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh bidang dan UPT melalui 3 (tiga) program dengan indikator pendukung sebanyak 12 (dua belas) indikator antara lain:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, terdiri dari 8 (delapan) indikator, yaitu:
 - Produktivitas padi (ku/ha);
 - Persentase luas panen tanaman pangan;
 - Persentase peningkatan luas panen hortikultura;
 - Persentase peningkatan produksi benih sumber tanaman pangan;
 - Persentase peningkatan produksi benih sumber hortikultura bermutu;
 - Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi;
 - Persentase peningkatan benih hortikultura yang diawasi; dan
 - Persentase peredaran pestisida yang kadaluarsa, palsu dan ilegal.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:
 - Persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2x;
 - Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas; dan
 - Angka produktivitas benih sumber tanaman padi (ku/ha).
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu:
 - Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim.



Tabel 3.4 Target dan Realisasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta Capaian Indikator Program Pendukung Tahun 2021

No.	IKU Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran 2021	Realisasi Kinerja Sasaran 2021	Capaian Target Kinerja Sasaran (%)	Sasaran Kinerja Program Pendukung (Sasaran Program)	Target Kinerja Pendukung	Realisasi Kinerja Pendukung	Capaian Target Kinerja Program (%)	Penanggung Jawab
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton):	1.619.100	1.562.525	96,51	Produktivitas padi (ku/ha)	30,43	31,38	103,12	Kabid Tanaman Pangan
	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.119.520	988.261	88,28	Persentase luas panen tanaman pangan (%)	97,34	95,24	97,84	
	- Padi	873.500	776.797	88,93	Persentase peningkatan luas panen hortikultura (%)	2,00	8,15	407,35	Kabid Hortikultura
	- Jagung	246.020	211.464	85,95					
	Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	499.580	574.264	114,95	Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi (%)	6,50	38,06	585,54	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
	- Tanaman Buah	423.650	494.321	116,68	Persentase peningkatan benih hortikultura yang diawasi (%)	6,50	7,06	108,62	
	- Tanaman Sayuran	51.500	59.720	115,96					
	- Tanaman Obat	24.430	20.223	82,78					
					Persentase peningkatan produksi benih sumber Tanaman Pangan (%)	10,00	20,90	208,96	Kepala UPT Pembenhian Tanaman Pangan
					Persentase Peningkatan Produksi Benih Hortikultura yang bermutu (%)	3,50	4,55	129,87	
					Persentase Peredaran Pestisida yang Kadaluarsa, Palsu dan Ilegal (%)	35,00	0,00	100,00	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura
					Persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2x (%)	1,79	8,84	493,85	Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian
					Persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas (%)	2,00	-0,20	-10,00	
					Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi (ku/ha)	21,90	24,74	112,96	Kepala UPT Pembenhian Tanaman Pangan
					Persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim (%)	3,17	3,09	97,48	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Keterangan: Capaian indikator persentase peredaran pestisida yang kadaluarsa, palsu dan ilegal bermakna baik jika realisasi lebih kecil dari target.



Adanya target indikator program yang tercapai dan tidak tercapai, cukup berpengaruh terhadap realisasi target sasaran strategis. Namun demikian tingkat keterkaitan masing-masing indikator program terhadap indikator sasaran strategis juga berbeda, demikian pula penentuan target dan realisasinya sangat penting untuk dianalisis lebih detail.

Keterkaitan dan analisis secara singkat masing-masing capaian indikator program dalam mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis produksi tanaman pangan dan hortikultura dapat dijabarkan pada bagian berikut:

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Produktivitas Padi (ku/ha) Persentase luas panen tanaman pangan (%)

Pada 2 (dua) indikator program di atas merupakan indikator kinerja pada Bidang Tanaman Pangan. Sebagaimana disebutkan bahwa produksi padi sangat dipengaruhi oleh produktivitas, luas tanam dan luas panen (Tabel 3.5). Produktivitas padi sawah tahun 2021 sebesar 31,38 ku/ha, sedangkan tahun 2020 sebesar 29,74 ku/ha. Namun peningkatan produktivitas tidak diiringi peningkatan luas panen sehingga produksi padi belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Rerata produktivitas naik (0,58 ku/ha). Produktivitas naik terjadi di Kabupaten Sambas, Landak, Mempawah, Ketapang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi dan Kayong Utara.

Produktivitas cenderung naik, tapi disertai penurunan luas panen, sehingga produksi secara total (sasaran strategi) tidak



tercapai. Luas panen mengalami penurunan sebesar 11,55%. Penurunan luas panen padi terjadi hampir pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat, kecuali Kabupaten Sintang dan Kota Singkawang. Penurunan luas panen padi yang melebihi 25% ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Sanggau dan Mempawah. Sedangkan penurunan luas panen pada kisaran 10-20% ada di Kabupaten Sekadau, Kota Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Melawi, Bengkayang, Kubu Raya dan Ketapang. Peningkatan luas panen hanya ada di Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang. Penurunan luas panen disebabkan mundurnya jadwal tanam. Jadwal tanam yang bergeser terutama untuk kegiatan bantuan pemerintah disebabkan penyaluran sarana (benih dan pupuk) mengalami keterlambatan akibat pembatasan kegiatan sosial/pandemi covid-19. Selain itu, terjadinya bencana banjir pada beberapa wilayah pada triwulan IV menyebabkan tanaman mengalami puso.

Pada tahun 2021, luas tanam padi 259.886 ha menurun sebesar 3,53% dibandingkan tahun 2020 dengan luas tanam 269.404 ha. Pada tabel 3.6 dapat dilihat beberapa kabupaten dengan produktivitas meningkat, namun luas panen dan produksinya menurun. Persentase luas panen tanaman pangan 2021 diperoleh dari perbandingan luas panen dengan luas tanam. Luas panen padi adalah 247.510 ha sehingga persentase luas panen tanaman pangan yang menjadi salah satu indikator program pendukung adalah 95,24%. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada Bidang Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 3.7.



Tabel 3.5 Perbandingan Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Tahun 2020 dan ASEM Tahun 2021

Kabupaten/Kota	ATAP 2020 - KSA						ASEM 2021			% NAIK/TURUN		
	JAN - DES			JAN - DES			JAN - DES			JAN - DES		
	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Ku/Ha	Produksi (Ton)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01. Kab Sambas	74.313,38	24,25	180.174,82	73.611,73	27,22	200.361,87	-0,94	12,26	11,20			
02. Kab. Bengkayang	11.227,40	29,79	33.450,76	9.477,42	27,86	26.400,73	-15,59	-6,50	-21,08			
03. Kab. Landak	27.208,84	37,38	101.694,62	26.643,70	39,19	104.415,48	-2,08	4,85	2,68			
04. Kab. Mempawah	21.173,76	33,95	71.895,23	15.610,97	34,55	53.933,02	-26,27	1,75	-24,98			
05. Kab Sanggau	27.400,95	27,35	74.933,34	20.167,75	25,28	50.976,49	-26,40	-7,57	-31,97			
06. Kab Ketapang	31.072,19	32,97	102.450,35	27.313,83	39,07	106.711,38	-12,10	18,49	4,16			
07. Kab Sintang	8.814,34	27,17	23.951,37	9.036,67	26,95	24.358,32	2,52	-0,80	1,70			
08. Kab Kapuas Hulu	9.259,69	29,95	27.730,63	6.565,62	31,42	20.626,88	-29,09	4,90	-25,62			
09. Kab. Sekadau	10.287,70	29,90	30.764,44	8.294,99	31,36	26.010,81	-19,37	4,86	-15,45			
10. Kab Melawi	3.834,04	28,12	10.782,16	3.160,14	31,60	9.987,28	-17,58	12,38	-7,37			
11. Kab. Kayong Utara	15.439,62	31,76	49.030,58	12.671,70	36,28	45.967,77	-17,93	14,23	-6,25			
12. Kab. Kubu Raya	36.027,60	30,79	110.923,77	30.796,15	29,76	91.661,67	-14,52	-3,33	-17,37			
13. Kota Pontianak	206,35	36,77	758,69	168,92	36,42	615,28	-18,14	-0,93	-18,90			
14. Kota Singkawang	3.569,43	38,68	13.807,34	3.990,23	37,02	14.770,45	11,79	-4,31	6,98			
KALBAR	279.835,29	29,74	832.348,10	247.509,82	31,38	776.797,43	-11,55	5,51	-6,67			

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2022

**Persentase peningkatan luas panen hortikultura (%)**

Persentase peningkatan luas panen hortikultura merupakan indikator kinerja pada Bidang Hortikultura. Dengan peningkatan luas panen diharapkan terjadi peningkatan produksi hortikultura. Adapun kaitan dengan pelaku agribisnis juga dapat meningkatkan luas panen serta produksi. Luas panen yang didata terdiri dari luas panen untuk tanaman buah, tanaman sayuran dan tanaman obat. Tahun 2021, untuk mendukung tercapainya produksi hortikultura sebesar 499.580 ton ditargetkan adanya peningkatan luas panen hortikultura sebesar 2,0%. Adapun berdasarkan pengukuran kinerja, dari target kenaikan sebesar 2% luas panen justru terjadi peningkatan sebesar 8,15% dari tahun 2020. Luas panen hortikultura tahun 2021 seluas 36.448 ha, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 33.702 ha. Rincian luas panen untuk masing-masing komoditas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Hortikultura

NO	KELOMPOK KOMODITI	LUAS TANAM		LUAS PANEN		PRODUKSI	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	TAN. SAYURAN BUAH SEMUSIM (SBS)	19.484	20.095	17.707	17.471	50.641	59.720
2	TAN. BUAH TAHUNAN (BST)	56.512	55.568	15.684	18.631	491.126	494.321
3	TAN. BIOFARMAKA (TBF)	503	530	312	346	22.577	20.223
JUMLAH TOTAL		76.499	76.193	33.702	36.448	564.345	574.264

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk komoditas tanaman buah mengalami penurunan luas panen sekitar 1,33%. Sementara untuk komoditas tanaman sayuran dan tanaman obat mengalami peningkatan masing-masing sebesar 18,79% dan 10,9%. Penurunan luas panen dikarenakan penghitungan luas panen (tanaman buah) biasanya hanya berdasarkan luas lahan pertanaman tanpa memperhitungkan bahwa pada lahan pertanaman yang sama dapat dilakukan 2 kali/lebih panen. Adapun target, realisasi dan



analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada Bidang Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Persentase peningkatan benih tanaman pangan yang diawasi (%)
Persentase peningkatan benih hortikultura yang diawasi (%)

Indikator program ini menjadi indikator kinerja pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Faktor penggunaan benih cukup berpengaruh terhadap produksi pertanian, terutama padi. Penggunaan benih bermutu varietas unggul bisa meningkatkan produktivitas dan peningkatan kualitas produk. Penggunaan benih unggul di Kalimantan Barat masih berkisar 80-85%. Selebihnya menggunakan benih lokal. Hal ini berdampak pada produksi dan produktivitas tanaman pangan kurang optimal. Pemenuhan kebutuhan benih masih banyak berasal dari luar Kalimantan Barat sehingga pengembangan penangkar lokal masih terkendala. Indikator program ini mengharapkan adanya peningkatan ketersediaan benih yang bermutu dalam memenuhi kebutuhan benih tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Barat. Tahun 2021, capaian kinerja persentase peningkatan pengawasan benih tanaman pangan dari target 6.5% dapat terealisasi 38,06% (capaian kinerja 585,54%), sedangkan persentase peningkatan pengawasan benih hortikultura dari target 6.5% dapat terealisasi 7,06% (capaian kinerja 108,62%).

Di sisi lain, tidak tercapainya target pengawasan benih tanaman pangan dan hortikultura disebabkan rendahnya penangkar yang mengajukan uji laboratorium benih, sehingga produksi calon benih tidak bisa dipasarkan. Selain itu rendahnya koordinasi antar UPT dan bidang teknis, dimana upaya pengembangan kawasan



komoditas tanaman pangan dan hortikultura sebagian besar belum menggunakan benih yang dihasilkan oleh penangkar tapi menggunakan benih dari luar Kalimantan Barat. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Persentase peningkatan produksi benih sumber Tanaman Pangan (%)
Persentase peningkatan produksi benih sumber Hortikultura (%)

Indikator program ini menjadi indikator kinerja pada UPT Pembenihan Tanaman Pangan. Ketersediaan benih masih menjadi permasalahan yang masih terjadi. Produksi benih sumber di Kalimantan Barat yang dihasilkan oleh UPT Pembenihan Tanaman Pangan belum cukup memadai. Persentase peningkatan produksi benih sumber tanaman pangan dan hortikultura menjadi indikator kinerja pada UPT Pembenihan Tanaman Pangan (UPTPTP). UPT Pembenihan Tanaman Pangan beserta penangkar dalam memproduksi benih mengikuti prosedur sesuai dengan peraturan perundangan dan dalam pengawasan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Benih merupakan salah satu sarana penting dalam usaha tani yang akan berpengaruh terhadap produksi. Unsur benih seharusnya memenuhi syarat 6 tepat, diantaranya tepat jumlah, mutu dan tepat waktu. Benih yang didatangkan dari luar Kalbar (bantuan pusat) biasanya akan mengalami keterlambatan dan akan berpengaruh terhadap jadwal tanam. Mutu benih juga akan berkurang sehingga keperluan benih dan biaya produksi lain akan bertambah. Demikian terkait dengan bantuan pusat berupa benih yang mengalami keterlambatan, jika pemenuhan benih dapat dipenuhi



produsen/penangkar benih lokal, jadwal tanam sesuai dengan yang direncanakan dan dapat berdampak pada capaian produksi.

Produksi benih sumber tanaman pangan diperoleh dari benih bersertifikat komoditi padi dan jagung saja. Jumlah produksi benih sumber (padi dan jagung) tahun 2021 (MT Rendeng 2020 + MT Gadu 2021) adalah sebesar 28.396 kg, sedangkan pada tahun 2020 (MT Rendeng 2019 + MT Gadu 2020) adalah sebesar 23.488 kg. Berdasarkan data tersebut, produksi benih sumber mengalami peningkatan sebesar 4.908 kg atau 20,90%. Angka ini melebihi target peningkatan yang hanya 10%, sehingga capaian kinerjanya adalah 208,96%.

Untuk produksi benih sumber hortikultura pada tahun 2021 sebesar 23.000 batang sedangkan pada tahun 2020 hanya sebesar 22.000 batang. Target persentase peningkatan produksi benih sumber hortikultura adalah 3,5%, namun berdasarkan data produksi di atas terdapat kenaikan sebanyak 1.000 batang atau naik sekitar 4,55%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 129,87%.

Dari segi jumlah dan mutu, produksi benih hortikultura melebihi target yang ditetapkan. Namun kaitan dengan sasaran strategis mendukung peningkatan produksi hortikultura belum dapat diukur pada tahun berjalan karena merupakan tanaman tahunan. Penyediaan benih bermutu hortikultura (tanaman tahunan) mendukung dalam pengembangan kawasan (luas tanam meningkat, diharapkan luas panen dan produksi meningkat). Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada UPT Pembenuhan Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 3.7.



Persentase Peredaran Pestisida yang Kadaluarsa, Palsu dan Ilegal (%)

Indikator program ini menjadi indikator kinerja pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Berbeda dengan indikator lainnya, semakin kecil realisasi pada indikator ini justru memiliki makna yang baik.

Penggunaan pestisida secara bijaksana melalui prinsip dan kaidah Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai keberhasilan program peningkatan produksi pertanian secara umum.

Peranan pestisida dalam upaya penyelamatan produksi pertanian dari gangguan hama dan penyakit tanaman masih sangat besar, apabila telah melebihi ambang batas pengendalian atau ambang batas ekonomi. Tidak dapat dipungkiri penggunaan pestisida oleh petani akhir-akhir ini cenderung meningkat, karena dianggap cara paling efektif untuk mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). Diharapkan dengan adanya deregulasi pestisida, penggunaan pestisida di tingkat lapangan semakin berkurang.

Permasalahan pestisida di lapangan tidak hanya sebatas beredarnya pestisida ilegal/tidak terdaftar, tetapi juga pestisida palsu, tidak sesuai mutu, *repacking* dan habis masa berlaku izinnya. Khusus untuk pestisida terbatas pelanggaran yang umum terjadi adalah pengguna pestisida terbatas belum mengikuti pelatihan pestisida terbatas sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang pendaftaran Pestisida.



Upaya mengatasi permasalahan peredaran pestisida di lapangan telah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengawasan dan menyiapkan petugas pengawas baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida di Pusat dan Provinsi seluruh Indonesia. Di samping itu juga telah dibentuk wadah koordinasi pengawasan pupuk dan pestisida berupa Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.

Sub kegiatan yang mendukung IKU program ini hanya 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian dengan indikator Jumlah Pengawasan Sebaran Pestisida yang beredar (unit) dan target kinerja sebanyak 2 (dua) unit. Pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan pada 2 (dua) kios di 2 (dua) lokasi berbeda yaitu Kabupaten Sanggau dan Bengkayang. Berdasarkan hasil monitoring, tidak ditemukan adanya pestisida yang ilegal pada kedua kios tersebut. Sehingga realisasinya adalah nol dengan capaian kinerja 100%. Namun pelaksanaan pengawasan pada 2 (dua) kios tersebut belum bisa mewakili data yang diperlukan. Hal ini juga terkendala karena kecilnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini yaitu hanya sebesar Rp 5.266.300 berupa biaya perjalanan dinas saja. Selain itu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sudah tidak relevan dengan tugas dan fungsi UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sehingga perubahan atau penghapusan IKU program yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi eselon 3



sangat perlu dilakukan untuk diusulkan kepada Bappeda. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 3.7.



Tabel 3.7 Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kab/Kota Dengan Sebaran Sarana Pertanian Sesuai Alokasi Dan Ketentuan Yang Berlaku	13 Kab/Kota	Kab/Kota	13 Kab/Kota	100,00	Terlaksananya kegiatan penyaluran pupuk dan pestisida sesuai dengan alokasi, waktu dan jumlah yang dibutuhkan oleh petani di 13 kab/kota.	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah penyaluran pupuk dalam hal ini pupuk bersubsidi yang dikelola dan diawasi dengan baik sesuai dengan alokasi, waktu, jumlah dan mutu berperan dalam peningkatan indeks pertanaman.	Kasi Alsintan, Pupuk dan Pestisida
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	13 Dokumen	Dokumen	13 Dokumen	100,00	Tersedianya data penyaluran pupuk dan pestisida sesuai dengan alokasi, waktu dan jumlah yang dibutuhkan oleh petani di 13 kab/kota.	Penyaluran pupuk dalam hal ini adalah pupuk bersubsidi yang dikelola dan diawasi dengan baik sesuai dengan alokasi, waktu, jumlah dan mutu yang berperan dalam peningkatan indeks pertanaman.	Kasi Alsintan, Pupuk dan Pestisida
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5 Kali	Kali	3 Kali	60,00	Perdin tidak dapat dilaksanakan, pertemuan sudah.	Adanya koordinasi dalam pengawasan peredaran sarana pertanian antar pihak terkait sehingga masing-masing pihak bekerja sama dalam pengawasan sarana pertanian.	Kasi Alsintan, Pupuk dan Pestisida
Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Areal Tanam Difasilitasi Benih Bermutu	2400 ha	ha	2152 ha	89,67	Adanya pemangkas anggaran sehingga penyaluran benih ke kabupaten/kota setara dengan luas tanam benih padi 1.550 ha, benih jagung 300 ha, benih kedelai 5 ha, bibit keledi 60 ha, bibit buah 183 ha dan benih sayuran 54 ha.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah dengan banyaknya luas areal tanam untuk benih/bibit bermutu di kabupaten/kota akan mampu meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kasi Tanaman Serealia
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Kabupaten/Kota Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura	10 Kab/Kota	Kab/Kota	13 Kab/Kota	130,00	Kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit hortikultura yaitu Kab. Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Mempawah, Landak, Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang, Sintang, Sekadau, Melawi, Kota Singkawang dan Pontianak.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah harapannya dapat memacu petani di lokasi kegiatan untuk terus mengembangkan bantuan benih/bibit hortikultura sehingga bisa meningkatkan angka produksi hortikultura.	Kasi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
		183 Ha		183 Ha	100,00	Terlaksananya fasilitasi bantuan bibit buah berupa: - bibit Alpokat ke Kab Kubu Raya 15 ha - bibit Durian setara luas tanam 30 ha ke Kab. Kayong Utara, Ketapang dan Mempawah masing-masing 10 ha - bibit Lengkeng ke Kab. Landak 56 ha, Kab. Sambas 10 ha dan Kab. Kapuas Hulu 5 ha - bibit Mangga ke Kab. Landak 47 ha - bibit Nenas ke Kab. Sambas 10 ha - bibit Pisang semula 20 ha, hanya terealisasi ke Kab. Sambas 10 ha akibat pemangkasan anggaran.		Kasi Tanaman Buah dan Florikultura
		6 ha		6 ha	100,00	Terselurnya bantuan benih bawang merah dan cabai setara luas tanam 6 ha ke Kab. Bengkayang, Kapuas Hulu dan Sintang masing-masing 1 ha untuk tiap komoditi.		Kasi Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
		4 ha		4 ha	100,00	Terselurnya bantuan benih sayuran dalam rangka pengembangan desa mandiri seluas 4 ha ke Kab. Sekadau dan Kayong Utara.		
		14 ha		14 ha	100,00	Terselurnya bantuan benih sayuran dalam rangka pengembangan sayuran seluas 14 ha di Kota Pontianak, Singkawang, Kab. Melawi, Landak, Kubu Raya, Mempawah dan Bengkayang.		
		0 ha		0 ha	0,00	Rencana penyaluran bantuan benih petai ke Kab. Sintang setara luas tanam 20 ha TIDAK TERLAKSANA karena pengadaannya pindah ke Dinas PUPR.		
		30 ha		30 ha	100,00	Terselurnya bantuan benih sayuran untuk pengembangan sayuran ke Kab. Kubu Raya setara luas tanam 30 ha.		

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Kabupaten/Kota Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Pangan	10	Kab/Kota	9 Kab/Kota	90,00	Kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitas penyediaan benih/bibit tanaman pangan yaitu Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, Ketapang, Sambas, Sintang, Kayong Utara dan Kota Pontianak.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah harapannya dapat memacu petani di lokasi kegiatan untuk terus mengembangkan bantuan benih/bibit tanaman pangan sehingga bisa meningkatkan angka produksi tanaman pangan.	Kasi Tanaman Serealia dan Kasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
		1850	ha	1850 ha	100,00	Terlaksananya penyaluran benih padi bermutu yang semula ditargetkan 3.000 ha, terealisasi 1.550 ha akibat pemangkasan anggaran dengan lokasi sebagai berikut Kota Singkawang 200 ha, Kab. Kubu Raya 200 ha, Mempawah 350 ha, Bengkayang 300 ha, Ketapang 300 ha dan Sambas 200 ha. Sedangkan penyaluran benih jagung bermutu yang semula ditargetkan 400 ha, terealisasi 300 ha akibat pemangkasan anggaran dengan lokasi sebagai berikut Kab. Sambas 100 ha, Mempawah 100 ha dan Bengkayang 100 ha.		Kasi Tanaman Serealia
		5	ha	5 ha	100,00	Rencana penyaluran benih kacang hijau seluas 20 ha tidak terlaksana akibat pemangkasan anggaran. Begitu juga dengan kedelai seluas 30 ha, terlaksana hanya seluas 5 ha di Kab. Mempawah.		Kasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
		60	ha	60 ha	100,00	Terlaksananya penyaluran benih umbi keladi yang semula 80 ha, terealisasi 60 ha akibat pemangkasan anggaran dengan lokasi sebagai berikut Kab. Sintang, Kayong Utara, Kubu Raya, Mempawah, Kota Pontianak dan Singkawang masing-masing 10 ha.		Kasi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah kab/kota dengan sebaran sarana pertanian sesuai alokasi dan ketentuan yang berlaku	2	Kab/Kota	2 Kab/Kota	100,00	Terlaksananya pendataan serta pemeriksaan peredaran pestisida di Kab. Sanggau dan Bengkayang.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah memberikan informasi penilaian distributor untuk kelayakan alokasi pengiriman kepada toko/kios atau pengecer secara tepat	Kasi Sarana, Prasarana dan Pengawasan Pestisida
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Asintan, Dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Sebaran Pestisida yang beredar (Unit)	2	unit	2 unit	100,00	Terlaksananya pendataan serta pemeriksaan peredaran pestisida 2 toko/kios di Kab. Sanggau dan Bengkayang	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan informasi penilaian distributor untuk kelayakan alokasi pengiriman kepada toko/kios atau pengecer secara tepat	Kasi Sarana, Prasarana dan Pengawasan Pestisida
Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman pangan yang diawasi (Ton)	600	ton	1.800,60 ton	300,10	Terlaksananya sejumlah benih tanaman pangan yang diawasi bersumber dana APBD adalah: PAJALE sebanyak 1.800,6 ton dan Talas sebanyak 354.000 anakan Untuk realisasi, angka yang digunakan bersumber dari PAJALE saja	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah melindungi produsen benih dalam penggunaan benih unggul bermutu untuk mendukung meningkatkan produksi tanaman pangan.	Kasi Pengawasan Peredaran Benih
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	1. Jumlah layanan sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura; 2. Jumlah pengujian sampel uji benih tanaman pangan; 3. Luas layanan areal penangkaran benih tanaman pangan yang disertifikasi (Ha)	200	Ha	200 Ha	100,00	Terlaksananya proses sertifikasi, pelabelan dan pengujian sampel benih dari produsen benih setara dengan luas 200 ha atau lebih.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan jaminan kepada produsen benih dalam memasarkan benih yang diproduksi. Dengan penggunaan benih bermutu dan bersertifikat oleh para petani dan penangkar, dapat meningkatkan produksi benih tanaman pangan dan hortikultura.	Kasi Sertifikasi
		180.000	batang/ rumpun	180.000 batang/ rumpun	100,00	Terlaksananya proses sertifikasi dan pelabelan benih hortikultura dengan rincian: - batang (buah-buahan) 178.693 batang - anakan (nenas) 100.000 anakan		Kasi Sertifikasi
		110	sampel	167 sampel	151,82	Diterimanya sampel uji benih untuk pengujian di laboratorium dengan rincian: - tanaman pangan = 167 sampel		Kasi Sertifikasi

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah pengawasan dan peredaran benih hortikultura	190.000	batang	190.000 batang	100,00	Terlaksananya pengawasan dan peredaran benih hortikultura dengan rincian: - batang (buah-buahan) 178.693 batang - anakan (nenas) 100.000 anakan	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan informasi terhadap peredaran benih hortikultura.	Kasi Pengawasan Peredaran Benih
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1. Luas tanam penangkar benih sumber tanaman pangan; 2. Pengawasan dan peredaran benih tanaman pangan (Ton)	100	Sampel	76 Sampel	76,00	Terlaksananya sampel uji benih untuk pengujian laboratorium dengan rincian: - hortikultura = 76 sampel		Kasi Pengawasan Peredaran Benih
		5.000	Kg	26,74 Kg	0,53	Terlaksananya pengawasan dan peredaran benih sayuran/tanaman obat dengan rincian: - sayuran 26.74304 kg		Kasi Pengawasan Peredaran Benih
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	1. Luas tanam penangkar benih sumber tanaman pangan; 2. Pengawasan dan peredaran benih tanaman pangan (Ton)	600	Ton	1.800,60 Ton	300,10	Terlaksananya sejumlah benih tanaman pangan yang diawasi bersumber dana APBD adalah: PAJALE sebanyak 1.800,6 ton dan Talas sebanyak 354.000 anakan Untuk realisasi, angka yang digunakan bersumber dari PAJALE saja.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah melindungi produsen benih dalam penggunaan benih unggul bermutu untuk mendukung meningkatkan produksi tanaman pangan.	Kasi Pengawasan Peredaran Benih
		1.209	Unit	1.209 Unit	100,00	Terlaksananya sejumlah Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola.	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah menjamin adanya pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan SDG lokal di daerah dan menjamin ketersediaan benih/bibit bermutu secara maksimal dan berkesinambungan.	Kasi Sertifikasi
Penilaian Kultur Sumber Daya Genetik Tumbuhan dan Mikroorganisme	1. Jumlah Calon Varietas Tanaman Hortikultura; 2. Jumlah Determinasi Pohon Induk Tanaman (PI/R); 3. Jumlah Pemurnian Varietas Lokal Unggul Daerah; 4. Jumlah Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura; 5. Jumlah Petak Pembanding.	3	Unit	3 Unit	100,00	Terlaksananya proses kegiatan observasi/uji kebenaran dalam rangka pelepasan varietas hortikultura, terlaksananya proses kegiatan pemurnian varietas lokal unggul daerah dalam rangka pelepasan varietas, terlaksananya proses kegiatan pemurnian varietas hortikultura, terlaksananya proses kegiatan petak pembanding serta terlaksananya proses kegiatan determinasi pohon induk dan rumpun induk.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah memberikan informasi/data yang akurat mengenai keunggulan yang dimiliki varietas/galur/hibrida/klon dibandingkan dengan varietas yang sudah ada atau varietas baru atau varietas yang sudah dilepas, sebelum varietas tersebut dilepas sebagai varietas unggul.	Kasi Sertifikasi

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi calon benih sumber tanaman pangan	70,34	Ton	73,62 Ton	104,66	Produksi calon benih sumber tanaman pangan berasal dari calon kelas BD dan BP untuk semua komoditi tanaman pangan adalah 73,618 Ton (MT Rendeng 2020/2021 dan MT Gadu 2021).	Kaitan kegiatan dengan capaian program adalah capaian yang diperoleh tahun 2021 diatas target yang ditentukan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produktivitas tanaman padi dan penanganan pasca panen yang lebih optimal.	Kasi Benih Tanaman Pangan
	Jumlah produksi benih tanaman buah dan florikultura memenuhi standar	27.500	Btg/ Rumpun	27.500 Btg/ Rumpun	100,00	Tercapainya produksi benih tanaman buah.	Dengan tercapainya produksi benih diharapkan mampu meningkatkan angka produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kasi Benih Tanaman Hortikultura
	Jumlah produksi benih tanaman sayuran dan obat yang memenuhi standar	5.883	Kg	5.883 Kg	100,00	Tercapainya produksi benih tanaman sayuran.		
Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Luas tanam penangkaran benih sumber tanaman pangan	47	ha	47 ha	100,00	Terlaksananya perbanyak benih sumber tanaman pangan dengan rincian: - perbanyak benih sereal (padi 26 ha dan jagung 2 ha) - perbanyak benih padi kemiraan 6 ha - perbanyak benih akabi (kedelai 2 ha, kacang hijau 4 ha dan kacang tanah 1 ha) - demonstrasi benih unggul (kacang hijau 4 ha) - penanaman dan pemeliharaan kebun koleksi seluas 2 ha (aneka kacang dan umbi)	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah dengan meningkatnya luas tanam diharapkan akan meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya: 1. Adanya pengulangan tanam pada perbanyak benih sereal (padi) seluas ± 1.25 ha akibat banjir menjelang pembungaan tanaman padi di KB Periraman. Kendala lain serangan hama tikus di KB Samalantan dan KB Sungai Kakap. 2. Adanya pengulangan tanam pada perbanyak benih padi kemiraan seluas 1 ha akibat banjir menjelang pembungaan sehingga padi tidak tumbuh baik dan menunjukkan gejala layu (mati). Pengulangan tanam seluas 1 ha baru bisa di panen pada MT Rendeng 2021/2022.	Kasi Benih Tanaman Pangan

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
		28 ha		28 ha	100,00		<p>3. Adanya kesulitan memperoleh benih sumber pada perbanyakan benih akabi (kedelai dan kacang tanah) sehingga terjadi kemunduran jadwal tanam. Akibatnya saat benih tersedia, pertanaman berada pada keadaan iklim yang beresiko terkena serangan hama dan penyakit, sehingga berpotensi menurunnya produktivitas tanaman.</p> <p>4. Demonstrasi Benih Unggul dimaksudkan sebagai media sosialisasi dan pengenalan varietas unggul baru pada masyarakat. Kendala dalam memperoleh benih sumber dengan varietas yang direncanakan sejak awal juga dialami sehingga mengubah jadwal tanam dan varietas.</p> <p>5. Penanaman dan pemeliharaan kebun koleksi benih berupa aneka kacang atau umbi di kebun koleksi UPTTP sebagai media sosialisasi dan memperkenalkan beberapa varietas unggul dan untuk media pembelajaran. Namun, keanekaragaman komoditi di sekitar Kebun Koleksi berpotensi menjadi sumber hama dan penyakit.</p> <p>6. Kondisi pergudangan penampungan hasil yang kurang standar dan penanganan pasca panen yang belum optimal.</p>	Kasi Benih Tanaman Pangan
		28 ha		28 ha	100,00	Terlaksananya perbanyakan benih padi MT Gadu 2021 seluas 10,2 Ha dengan rincian: KB Peniraman 3 Ha (BD-BP), KB Samalantan 1 Ha (BS-BD) dan 2,2 Ha (BD-BP), serta KB Sungai Kakap 4 Ha (BD-BP).		Kasi Benih Tanaman Pangan

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
						Terlaksananya perbanyakkan benih jagung MT Gadu 2021 seluas 2 Ha dengan rincian: KB Matang Segantar 1 Ha (BS-BD) dan 1 Ha (BD-BP).		Kasi Benih Tanaman Pangan
		6 ha		6 ha	100,00	Terlaksananya perbanyakkan benih padi MT Rendeng 2021/2022 seluas 15,8 Ha dengan rincian: KB Peniraman 7 Ha (BD-BP), KB Samalantan 5,8 Ha (BD-BP), KB Matang Segantar 1 Ha (BD-BP) dan KB Sungai Kakap 2 Ha (BD-BP).		
		2 ha		2 ha	100,00	Terlaksananya perbanyakkan benih sumber kedelai (BD-BP) seluas 2 ha di KB Merowi (Kab. Sanggau).		
		4 ha		4 ha	100,00	Terlaksananya perbanyakkan benih sumber kacang hijau (BS-BD) seluas 4 ha dengan rincian 2 ha di KB Paoh (Kab. Sintang) dan 2 ha di KB Matang Segantar (Kab. Sambas). Tanam di MT Gadu.		
		1 ha		1 ha	100,00	Terlaksananya perbanyakkan benih sumber kacang tanah (BD-BP) seluas 1 ha di KB Paoh (Kab. Sintang). Tanam di MT Rendeng.		
		4 ha		4 ha	100,00	Terlaksananya Demonstrasi Benih Unggul dengan rincian kedelai (BD-BP) seluas 1 ha di KB Merowi (Kab. Sanggau), kacang hijau (BS-BD) seluas 1 ha di KB Matang Segantar (Kab. Sambas), tanam di MT Gadu. Sedangkan kacang hijau (BP-BR) seluas 1 ha di KB Paoh (Kab. Sintang), dan padi lokal Ringkak Condong seluas 1 ha di KB Matang Segantar (Kab. Sambas) tanam di MT Rendeng.		

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021
 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
		2 ha	2 ha	2 ha	100,00	Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan kebun koleksi benih dengan rincian kedelai seluas 0,3 ha, kacang hijau seluas 0,4 ha dan ubi kayu seluas 0,4 ha, tanam di MT Gadu. Sedangkan yang ditanam di MT Rendeng ada kacang hijau seluas 0,5 ha dan kacang tanah seluas 0,5 ha. Semua komoditas ini ditanam di lokasi KB Peniraman.		Kasi Benih Tanaman Pangan
		35 ton	35 ton	35 ton	100,00	Terlaksananya proses pemeliharaan untuk menjaga kualitas stok benih dengan cara pengeringan, cek laboratorium dan pengemasan ulang benih serta mengoptimalkan anggaran yang ada untuk penanganan efektif pencegahan kerusakan benih agar tetap mampu berjangka panjang untuk sertifikasinya.		
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah perbanyakkan tanaman florikultura	4.000 batang	4.000 batang	4.000 batang	100,00	Terlaksananya perbanyakkan stek benih/bibit florikultura yang terdiri atas benih <i>seedling</i> tanaman bunga sebanyak 1.500 batang, benih <i>seedling</i> tanaman daun 1.500 batang dan planlet tanaman 1.000 batang; disertai dengan kegiatan perawatan.	Kaitan sub kegiatan dengan capaian program adalah dengan tercapainya target perbanyakkan benih hortikultura yang bermutu dan bersertifikat dapat meningkatkan jumlah produksi hortikultura.	Kasi Benih Tanaman Hortikultura
	Jumlah perbanyakkan benih tanaman sayuran dan obat	6.883 kg	5.883 kg	5.883 kg	100,00	Terlaksananya pelaksanaan meliputi pengolahan lahan termasuk pembuatan bedengan untuk penanaman benih sayur; pemeliharaan yang meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian HPT dan penyiangan gulma, serta panen dan pasca panen. Target harusnya mengalami perubahan menjadi 5.883 kg pada saat perubahan anggaran, sehingga capaian kinerja sebenarnya 100%.		

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.7...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
	Jumlah pohon induk hortikultura yang dikembangkan	245	batang	245 batang	100,00	Terlaksananya pengembangan pohon induk buah yang mencakup pengendalian hama penyakit tanaman, pemupukan, penyiangan gulma dan pemangkasan.		Kasi Benih Tanaman Hortikultura
	Jumlah perbanyakkan benih tanaman buah	23.000	batang	23.000 batang	100,00	Tahap melaksanakan meliputi kegiatan perbanyakkan (okulasi/sambung) benih / bibit buah – buahhan yang terdiri atas sukun sebanyak 1.000 batang, Matoa sebanyak 5.000 batang, Durian sebanyak 5.000 batang, Mangga sebanyak 500 batang, Lengkeng 5.000 batang, Rambutan 500 batang, Jeruk 5.000 Batang dan Alpokat 1.000 Batang; disertai dengan kegiatan perawatan.		



PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Persentase peningkatan luas lahan sawah ditanami 2x (%)
**Persentase peningkatan produksi pertanian melalui
pengembangan komoditas (%)**

Peningkatan luas lahan sawah yang ditanami 2 kali atau lebih dalam rangka meningkatkan indeks pertanaman padi dan peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas merupakan indikator kinerja eselon 3 pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

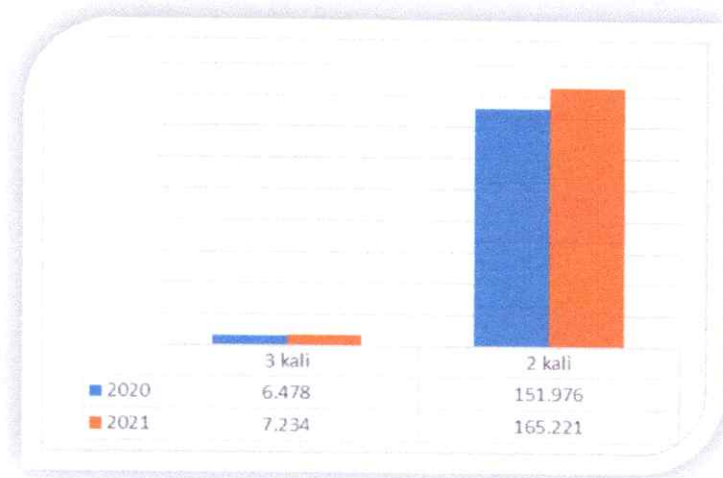
Luas lahan sawah ditanam 2 kali atau lebih mengalami peningkatan dari 158.454 ha pada tahun 2020 menjadi 172.455 ha pada tahun 2021 (naik sebesar 8,84%). Indikator kinerja program ini berhubungan erat dengan upaya peningkatan produksi terutama terhadap peningkatan luas tanam atau luas panen. Dengan meningkatnya indeks pertanaman akan meningkatkan produktivitas lahan dan produksi pertanian, secara tidak langsung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Wilayah kecamatan yang lahan sawahnya ditanami padi sebanyak 3 kali antara lain Kabupaten Sambas (Selakau Timur, Salatiga dan Semparuk), Kabupaten Bengkayang (Teriak), Kabupaten Landak (Sengah Temila), Kabupaten Mempawah (Sungai Pinyuh, Anjongan dan Toho), Kabupaten Sanggau (Kembayan), Kabupaten Sintang (Sepauk), Kabupaten Kayong Utara (Sukadana), Kabupaten Kapuas Hulu (Hulu Gurung) dan Kota Singkawang (Singkawang Selatan dan Singkawang Timur).



Secara rinci luas lahan sawah ditanami 2 kali atau lebih dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3.6 Luas Lahan Sawah ditanami 2 kali atau lebih



Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk penyediaan kebutuhan air irigasi untuk pertanaman padi. Dengan tersedia jaringan irigasi yang baik dan lancar diharapkan petani bisa menanam padi 2 kali atau lebih. Selain itu juga dilakukan pengembangan jalan usaha tani dalam rangka peningkatan luas tanam dan pengelolaan lahan. Prasarana jalan usaha tani menjadi faktor penting dalam usaha pertanian karena dapat memperlancar pengangkutan baik untuk sarana produksi budidaya maupun untuk mengangkut alat mesin dan hasil panen. Kelancaran jalan juga akan dapat meningkatkan kualitas hasil panen.

Sama halnya dengan UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, indikator kinerja program ini sudah tidak relevan lagi sebagai indikator kinerja program eselon 3 pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian karena sumber datanya dimiliki oleh Bidang Tanaman Pangan, sehingga diperlukan perubahan IKU program yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi eselon 3 pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian untuk diusulkan kepada Bappeda.



Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar suatu wilayah berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah adalah pengembangan sektor pertanian yang merupakan sektor utama pendukung perekonomian di Kalimantan Barat. Terkait hal tersebut ditetapkan salah satu indikator kinerja program berupa persentase peningkatan produksi pertanian melalui pengembangan komoditas, baik tanaman pangan maupun hortikultura. Khusus tanaman pangan, hanya produksi padi dan jagung saja yang digunakan dalam perhitungan. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n)} - \text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n - 1)}}{\text{Jumlah produksi TP dan Hortikultura (n - 1)}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja (Tabel 3.1) diperoleh jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2021 adalah 1.562.525 ton sedangkan produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2020 adalah 1.596.014 ton. Terjadi penurunan produksi sebesar 33.489 ton atau sekitar -2,10%. Menurunnya jumlah produksi salah satunya disebabkan oleh menurunnya luas panen sebagai akibat bencana banjir pada triwulan IV di beberapa wilayah kabupaten serta adanya areal lahan yang mengalami puso. Indikator kinerja program ini juga tidak relevan sebagai indikator kinerja program eselon 3 pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian karena sumber datanya dimiliki oleh Bidang Tanaman Pangan. Oleh sebab itu, perubahan IKU program yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi eselon 3 pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian sangat perlu dilakukan untuk diusulkan kepada Bappeda. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan



pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Angka Produktivitas Benih Sumber Tanaman Padi (ku/ha)

Benih merupakan salah satu sarana penting dalam usaha tani yang akan berpengaruh terhadap produksi. Unsur benih seharusnya memenuhi syarat 6 tepat, diantaranya tepat jumlah, mutu dan tepat waktu. Benih yang didatangkan dari luar Kalimantan Barat (bantuan pusat) biasanya akan mengalami keterlambatan dan akan berpengaruh terhadap jadwal tanam. Mutu benih juga akan berkurang sehingga keperluan benih dan biaya produksi lain akan bertambah. Demikian terkait dengan bantuan pusat berupa benih yang mengalami keterlambatan, jika pemenuhan benih dapat dipenuhi produsen/penangkar benih lokal, jadwal tanam sesuai dengan yang direncanakan dan dapat berdampak pada capaian produksi. UPT Pembenihan Tanaman Pangan menjadi institusi yang bertugas memproduksi benih sumber untuk dikembangkan kembali. Peningkatan produksi dan produktivitas benih sumber menjadi indikator kinerja pada UPT Pembenihan Tanaman Pangan (UPTPTP).

Tahun 2021, produktivitas benih sumber tahun 2021 ditargetkan sebesar 21,90 ku/ha. Sesuai sistem alur perbenihan, UPT Pembenihan Tanaman Pangan menghasilkan benih sumber (kelas BD dan BP) yang selanjutnya disalurkan pada penangkar benih untuk diperbanyak menjadi kelas yang lebih rendah (BP dan BR). Namun alur perbenihan hingga saat ini belum dapat berjalan dengan baik, karena sebagian para penangkar ada yang memproduksi benih kelas BP yang bukan menjadi wewenangnya untuk memenuhi



kebutuhan benih sumber di Provinsi Kalimantan Barat. Adapun produktivitas benih sumber yang dihasilkan pada tahun 2021 adalah sebesar 24,74 ku/ha. Terdapat peningkatan angka produktivitas dari tahun sebelumnya sebesar 2,84 ku/ha atau meningkat sekitar 12,97%. Capaian kinerja program UPT Pembenihan Tanaman Pangan terealisasi 112,97% dari target. Kinerja program ini diharapkan berkontribusi terhadap produksi tanaman pangan melalui penyediaan benih bermutu terutama terkait produktivitas. Jika produktivitas benih sumber meningkat, maka meskipun luasan perbanyakkan/penangkaran benih tetap maka produksi calon benih juga meningkat.

Upaya peningkatan produktivitas benih tanaman pangan dan ketersediaan benih sumber dilaksanakan melalui perbanyakkan benih di area kebun benih yaitu KB Peniraman, KB Samalantan, KB Matang Segantar, KB Merowi, KB Paoh dan KB Sungai Kakap. Angka produktivitas ini diperoleh dari kegiatan perbanyakkan benih padi MT Gadu 2021 dengan luas panen 10,2 ha yang menghasilkan benih sumber sebanyak 25.235 kg. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan dengan capaian program yang dilaksanakan pada UPT Pembenihan Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel 3.8.



Tabel 3.8 Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi beserta Analisis Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kebun benih UPT yang dilakukan penataan prasarana pertanian	6 unit	6 unit	100,00	Terlaksananya kegiatan penataan prasarana pertanian di 6 (enam) kebun benih dengan rincian: - Kebun Benih Peniraman (Kab. Mempawah) - Kebun Benih Samalantan (Kab. Bengkayang) - Kebun Benih Matang Segantar (Kab. Sambas) - Kebun Benih Sungai Kakap (Kab. Kubu Raya) - Kebun Benih Merowi (Kab. Sanggau) - Kebun Benih Paoh (Kab. Sintang)	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah dengan penataan prasarana yang dilaksanakan pada kebun benih seperti pembangunan embung, penataan irigasi, rehabilitasi gudang serta lantai jemur, dapat membantu meningkatkan kualitas dalam perbanyakan benih sumber mulai dari proses pengolahan lahan sampai pasca panen. Dengan demikian diharapkan akan mampu meningkatkan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat untuk menghasilkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPT Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah unit prasarana dan sarana pertanian pada UPT yang dilakukan penataan	13 paket/unit	13 paket/unit	100,00	Terlaksananya pengadaan barang dan jasa untuk Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal yang bersumber dari PAD dengan rincian: - Rehabilitasi Mess Kantor UPTPTP (1 unit) - Pemeliharaan Mess KB Samalantan (1 tahun) - Optimasi Saluran Air dan Pematang pada lahan kebun benih Samalantan, Sungai Kakap dan Peniraman (3 paket) - Plank Nama Kepemilikan Aset (3 unit) - Pengecoran Halaman Kantor UPTPTP (1 paket) - Pembangunan Pagar Kantor UPTPTP (1 paket) - Pembangunan Jalan Usaha Tani UPTPTP (1 paket) - Pembangunan Pintu Air pada UPTPTP (2 unit)	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan adanya penataan prasarana seperti optimasi saluran air dan pematang, pembangunan JUT serta pintu air, mampu mendukung peningkatan kualitas kegiatan perbanyakan benih sumber sehingga akan meningkatkan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat yang berpengaruh juga pada peningkatan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.8...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
		46	paket/unit	42	91,30	<p>Terlaksananya pengadaan barang dan jasa untuk Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal yang bersumber dari DAK dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan/Rehab Gudang Kebun Benih Peniraman, Samalantan dan Matang Segantar (3 unit) - Peningkatan Lantai Jemur Kebun Benih Peniraman, Samalantan dan Matang Segantar (3 unit) - Perbaikan saluran pematang di Kebun Benih Peniraman dan Sungai Kakap (2 unit) - Pembangunan Saluran/Long Storage Sisi Kanan Kantor di KB Peniraman (1 unit) - Pembangunan Long Storage Kebun Benih Sungai Kakap dan Matang Segantar (2 unit) - Irigasi Perpompaan Besar Kebun Benih Merowi, Matang Segantar dan Paoh (3 unit) - Pembuatan Embung Kebun Benih Merowi dan Paoh (2 unit) - Pengadaan alat pengangkat (1 unit) - Pengadaan alat pengolahan tanah dan tanaman (5 unit) - Pengadaan alat panen (14 unit) - Pengadaan alat pasca panen (6 unit) <p>Sementara itu, Pembangunan Sumur Dalam KB Peniraman (1 unit) tidak dapat terlaksana karena tidak tersedianya biaya konsultansi perencanaan.</p> <p>Untuk Pembangunan Saluran/Long Storage Sisi Kiri Kantor di KB Peniraman (3 unit) terlaksana namun dalam pelaksanaannya harus mengalami GAGAL KONTRAK akibat sampai dengan berakhirnya kontrak, realisasi fisik pekerjaan tidak sampai 11%.</p>	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.8...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian	Luas lahan tanaman pangan dan hortikultura yang dikembangkan	22 ha		22 ha	100,00		Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura dapat mendukung meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kasi Tanaman Serealia, Kasi STO dan Kasi BUFLO
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	13 dokumen		10 dokumen	90,91	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Kelola Jaringan Irigasi dan SID Evaluasi Penataan Desain Jaringan Irigasi. Tersedianya dokumen Pelaporan Informasi Pasar (PIP) tanaman pangan dan hortikultura. Tersedianya dokumen penyusunan angka produksi tanaman pangan dan hortikultura. Target berubah dari 13 dokumen menjadi 11 dokumen.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan tersedianya sejumlah dokumen perencanaan pengembangan sarana, kawasan dan komoditas pertanian dapat mendukung sasaran strategis. Pelaporan Informasi Pasar (PIP) dapat memberikan gambaran/informasi harga komoditas pertanian di pasaran agar petani akan diperoleh sehingga bisa meningkatkan keinginan petani untuk tetap melakukan budidaya dan menambah luas tanam.	Kasi Irigasi dan Pembiayaan Pertanian
		1 dokumen		1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan Rencana Tata Kelola Jaringan Irigasi Pertanian.		Kasi Irigasi dan Pembiayaan Pertanian
		1 dokumen		1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Studi Investigasi dan Evaluasi Penataan Desain Jaringan Irigasi.		
		2 dokumen		2 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan dan Identifikasi Rencana Kebutuhan Tata Kelola Jaringan Irigasi Pertanian di Kabupaten Sintang dan Melawi.		
		1 dokumen		1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan Rencana Strategis Kebutuhan Aksesibilitas Infrastruktur Pertanian.		Kasi Perluasan dan Perindungan Lahan
		1 dokumen		1 dokumen	100,00	Tersedianya dokumen Penyusunan dan Identifikasi Rencana Kebutuhan Aksesibilitas Infrastruktur Pertanian di Kabupaten Sintang.		
		1 dokumen		0 dokumen	0,00	Kegiatan penyusunan PERDA tentang Kearifan Lokal tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pemotongan anggaran.		

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.8...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
		1	Dokumen	1	100,00	Penyusunan dokumen angka produksi tanaman hortikultura		Kasi Tanaman Sayur dan Tanaman Obat
		1	Dokumen	1	100,00	Penyusunan dokumen angka produksi tanaman pangan		Kasi Tanaman Sereal
		1	Dokumen	1	100,00	Penyusunan dokumen Pelaporan Informasi Pasar (PIP) komoditas Tan.Pangan		Kasi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
		1	Dokumen	1	100,00	Penyusunan dokumen Pelaporan Informasi Pasar (PIP) komoditas Hortikultura		Kasi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas pengembangan tanaman pangan Luas pengembangan hortikultura	10	Ha	10	100,00	Terlaksananya penerapan budidaya tanaman pangan pada kebun koleksi.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya pengembangan komoditas pertanian dapat mendukung meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kasi Tanaman Sereal
		12	Ha	12	100,00	Terlaksananya penerapan dan pengembangan budidaya tanaman hortikultura pada kebun koleksi, lahan aset dan lahan pekarangan dengan rincian komoditas sayuran dan obat seluas 2,5 ha sedangkan komoditas buah seluas 9,5 ha.		Kasi Tanaman Sayur dan Tanaman Obat dan Kasi Tanaman Buah dan Florikultura
		2,5	Ha	2,5	100,00	Terlaksananya proses budidaya jahe dan sayuran, serta pelaksanaan kegiatan OPAL hingga panen		Kasi Tanaman Sayur dan Tanaman Obat
		9,5	Ha	9,5	100,00	Pelaksanaan proses budidaya tanaman durian di Singkawang (5 ha), dan tanaman buah di citrus center dan tanaman buah lainnya		Kasi Tanaman Buah dan Florikultura
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan JUT	4	Kab/Kota	4	100,00	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT di 4 kab/kota dengan rincian Kab. Sambas, Landak, Kapuas Hulu, dan Sintang. Target semula 13 kab/kota berubah menjadi 4 kab/kota akibat adanya pemangkasan anggaran.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan JUT dapat mendukung salah sasaran strategis yaitu meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kasi Perluasan dan Perindungan Lahan

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.8...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2	Kab/Kota	2	100,00	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani di 2 kab/kota yaitu Kab. Sambas dan Landak. Target semula 3 kab/kota berubah menjadi 2 kab/kota akibat adanya pemangkasan anggaran.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani dapat mendukung salah sasaran strategis yaitu meningkatkan jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kasi Irigasi dan Pembiayaan Pertanian
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	5	Kali	1	100,00	Terlaksananya penyaluran bantuan berupa Pembangunan Bangsal Pascapanen Hortikultura dalam rangka Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya. Sedangkan kegiatan bintek pascapanen, CHP, GMP dan workshop rekayasa alisintan tidak dilaksanakan akibat adanya pemangkasan anggaran. Target semula 5 kali harusnya diubah menjadi 1 kali, dengan demikian, capaian kinerja tetap 100%.	Kasi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura	
	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan Pelatihan Pengolahan Hasil	5	Kali	5	100,00	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan kegiatan Penerapan Good Agricultural Practices/ Standard Operating Procedure (GAP/ SOP) sebanyak 5 poktan dengan rincian: Poktan Urip Mulyo, Ngudi Luhur, Tani Subur, Mukti Rahayu dan Mekar Sari.		
		2	Unit	2		Tersalurnya bantuan Pembangunan Bangsal Pascapanen Hortikultura sebanyak 1 unit untuk Kab. Landak dan Kab. Melawi.		Kasi Pascapanen dan Pengolahan Hasil Hortikultura
		12	Paket	12		Tersalurnya bantuan Pengadaan Sarana Pascapanen Hortikultura untuk kelompok tani (motor roda 3, terpal plastik, keranjang panen dan ember plastik) sebanyak 12 paket di 8 kab/kota, dengan rincian Kab. Sambas (2 poktan), Bengkayang (1 poktan), Mempawah (1 poktan), Landak (2 poktan), Sintang (2 poktan), Sanggau (1 poktan), Sekadau (1 poktan) dan Melawi (2 poktan).		

**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA****Persentase luas serangan OPT dan
dampak perubahan iklim (%)**

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura adalah luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat menyebabkan gagal panen. Persentase luas serangan OPT menjadi indikator kinerja pada UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pada tahun 2021, persentase luas serangan OPT dan dampak perubahan iklim ditargetkan sebesar 3,17% dari luas tanam yang dimonitor. Realisasi luas serangan OPT tanaman pangan sebesar 3,09% (14.468,54 ha) dari luas tanam yang ada seluas 468.388,2 ha, sehingga capaian kinerjanya 97,48%. Sementara realisasi luas serangan OPT hortikultura sebesar 5,42% (2.195,39 ha) dari luas tanam yang ada seluas 40.492 ha dengan capaian kinerja 170,98%. Namun untuk realisasi IKU yang digunakan hanya realisasi luas serangan OPT pada tanaman pangan.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya menurunkan luas serangan OPT yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di 14 kabupaten/kota. Selain itu, kondisi iklim juga memacu terjadinya serangan OPT. Pada tahun 2021, luas pengendalian OPT tanaman pangan seluas 21.179,77 ha sedangkan untuk hortikultura seluas 4.563,68 ha. Untuk penanggulangan



bencana seperti banjir, luas areal tanaman pangan yang ditanggulangi adalah seluas 9.227,76 ha sedangkan luas areal hortikultura seluas 218,07 ha. Sementara luas areal penanggulangan bencana kekeringan pada tanaman pangan adalah seluas 2.471,2 ha sedangkan luas areal hortikultura seluas 6,25 ha.

Dengan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT pada tahap awal, diharapkan mampu mencegah kegagalan produksi serta sebagai upaya mengamankan produksi guna untuk mencapai sasaran strategis. Selain itu, dilaksanakan kegiatan SL Pengendalian Hama Terpadu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengendalian OPT. Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida yang beredar di kabupaten/kota agar tetap memenuhi kualitas, masa berlaku dan peraturan perundangan yang ditetapkan. Secara umum kegiatan perlindungan bertujuan untuk mencegah kegagalan panen dan mengurangi resiko kehilangan hasil terkait serangan organisme pengganggu tanaman dan perubahan iklim. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian program yang dilaksanakan di UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat dilihat pada Tabel 3.9.



Tabel 3.9 Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

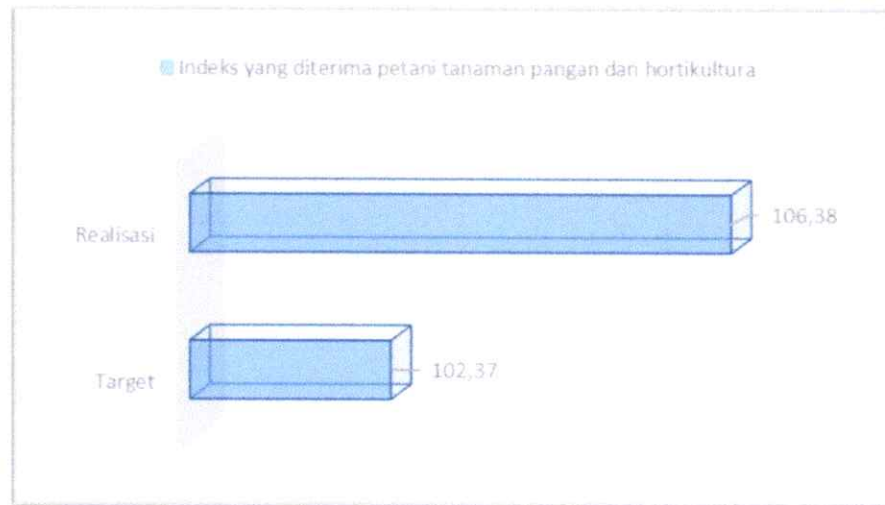
Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/DPI pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura	220 Ha		220 Ha	100,00	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan gangguan OPT/DPI pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 220. Namun, kenyataan dilapangan oleh petugas POPT pengendalian dan penanggulangan OPT/DPI lebih dari 220 ha.	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah semakin banyaknya lahan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan OPT dan DPI, semakin banyak lahan yang diamankan dari kegagalan panen sehingga mampu menjaga stabilitas produksi bahkan mendukung peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.	Kasi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian OPT
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah layanan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	14 Kab/Kota		14 Kab/Kota	100,00	Kegiatan ini dilaksanakan berupa pencatatan terhadap pemantauan dan pengendalian OPT setiap bulan oleh petugas POPT di 14 Kabupaten/Kota. Hasil dari kegiatan ini berupa data akurat serangan OPT sehingga dapat diambil tindakan yang tepat untuk antispasi dan pengendalian OPT.	Kegiatan ini sangat berkontribusi terhadap capaian kinerja program. Dengan tersedianya data, dapat diambil tindakan yang tepat untuk antispasi serangan OPT yang lebih besar.	Kasi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian OPT
	Jumlah Penerapan PHT yang dilaksanakan	7 Unit		7 Unit	100,00	Terlaksananya Penerapan PHT sebanyak 7 kegiatan dengan rincian 5 kegiatan merupakan PPHT tanaman pangan dan 2 kegiatan merupakan PPHT hortikultura. Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kompetensi petani alumni peserta SL-PHT dalam pengelolaan hama secara terpadu dan tepat sehingga jika ada serangan OPT mampu dikendalikan secara mandiri.	Kegiatan ini sangat berkontribusi terhadap capaian kinerja program. Dengan terlaksananya peningkatan kompetensi, dapat mengantisipasi serangan OPT yang lebih besar.	



2) KINERJA SASARAN STRATEGIS PENDAPATAN PETANI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Berdasarkan pengukuran kinerja, capaian kinerja indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura tahun 2021 (Tabel 3.1) adalah sebesar 106,38 (103,92%) dari target 102,37. Angka realisasi ini bersumber dari rata-rata indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan sebesar 100,97 dan indeks yang diterima oleh petani hortikultura sebesar 111,79.

Gambar 3.8 Indeks yang diterima petani



Sumber: BPS Kalbar, 2022 (diolah)

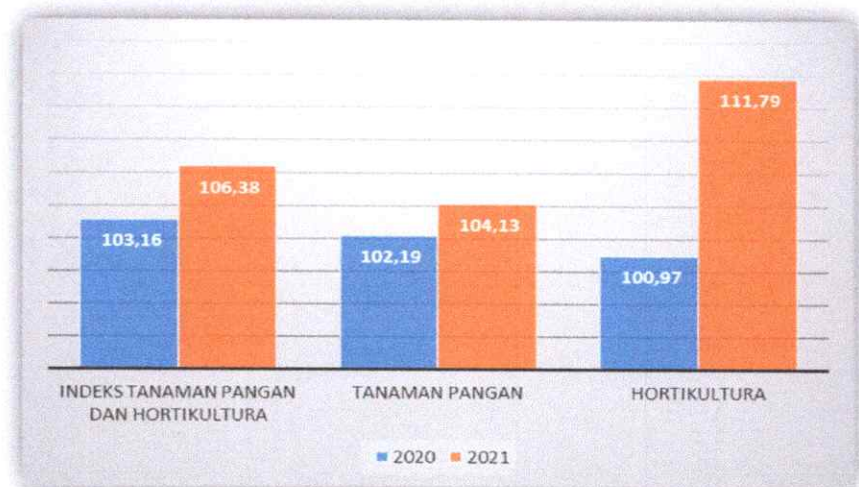
Indeks harga yang diterima petani (IH) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IH, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. IH dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya). Nilai IH sangat mempengaruhi Nilai



Tukar Petani (NTP). Semakin tinggi IT, semakin tinggi pula NTP. Semakin tinggi nilai IT, maka semakin tinggi nilai produksi yang dihasilkan petani, sedangkan bila semakin turun maka pendapatan yang diterima petani makin rendah.

Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura mengalami peningkatan sebesar 3,12% bila dibandingkan tahun 2020 yang realisasinya 103,16. Perbandingan indeks yang diterima petani berdasarkan sub sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Gambar 3.9 Indeks yang diterima petani berdasarkan sub sektor



Sumber: BPS Kalbar, 2022

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja (sasaran strategis) dapat dianalisis dan dikaitkan dengan indikator kinerja program pendukung. Indikator kinerja program secara berjenjang menjadi ukuran kinerja dari eselon 3.

Pencapaian kinerja tujuan/sasaran strategis pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh bidang dan UPT melalui 2 (dua) program dengan indikator pendukung sebanyak 4 (empat) indikator antara lain:



1. Program Penyuluhan Pertanian, terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:
 - Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit);
 - Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut; dan
 - Persentase penggunaan benih bermutu.
2. Program Perizinan Usaha Pertanian, terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu:
 - Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan.

Keterkaitan dan analisis secara singkat masing-masing capaian indikator program dalam mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dapat dijabarkan pada bagian berikut:

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Indeks yang diterima oleh Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta Capaian Indikator Program Pendukung Tahun 2021

No	IU Sasaran Strategis	Target Kinerja Sasaran 2021	Realisasi Kinerja Sasaran 2021	Capaian Target Kinerja Sasaran (%)	Sasaran Kinerja Program Pendukung (Sasaran Program)	Target Kinerja Pendukung	Realisasi Kinerja Pendukung	Capaian Target Kinerja Program (%)	Penanggung Jawab
2	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,37	106,38	103,92	Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	175,00	369,00	205,14	Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian
					Persentase Peningkatan kelompok tani kelas lanjut (%)	10,00	4,87	48,70	
					Persentase penggunaan benih bermutu (%)	2,00	1,43	71,50	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih
					Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (%)	10,00	5,00	50,00	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



Keterkaitan dan analisis secara singkat masing-masing capaian indikator program dalam mempengaruhi capaian kinerja sasaran strategis pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura dapat dijabarkan pada bagian berikut:

PROGRAM PENYULUH PERTANIAN

Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)
Persentase Peningkatan Kelompok Tani Kelas Lanjut (%)

Capaian kinerja indeks pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura didukung oleh Program Penyuluh Pertanian dengan indikatornya adalah Jumlah Kelembagaan Pertanian. Secara ideal, peran kelembagaan dan tenaga-tenaga penyuluh sangat penting dalam upaya peningkatan indeks pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura. Penyuluh pertanian memiliki peran sangat penting sebagai ujung tombak dalam transfer teknologi budidaya dan peningkatan sumberdaya petani dalam usaha tani dan agribisnisnya. Dengan Pengembangan kapasitas BPP dan kompetensi Penyuluh sangat berperan dan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan indeks pendapatan petani. Kelembagaan ekonomi petani yang berkembang memberikan kontribusi terhadap kemandirian dan kesejahteraan petani.

Pada tahun 2021 target jumlah kelembagaan pertanian yang diberikan pembinaan dan pendampingan sebanyak 175 unit. Kelembagaan pertanian dimaksud adalah kelembagaan kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), BPP dan KEP (Kelembagaan Ekonomi Petani). Target pembinaan dan



pendampingan dilakukan baik pada BPP dan KEP yang sudah ada maupun BPP/KEP yang baru dibentuk. Dari target sebanyak 175 unit sasaran BPP dan KEP, terealisasi sebesar 359 unit.

Selain terkait jumlah, indikator penting dalam SDM dan kelembagaan adalah kapasitas poktan, dalam hal ini kelompok tani kelas lanjut. Kelas-kelas poktan memberikan gambaran kapasitas sumberdaya petani. Peningkatan kapasitas poktan dan gapoktan diharapkan berpengaruh positif terhadap pengembangan sikap kepemimpinan, manajemen dan kewirausahaan dan usaha tani meningkatkan produksi. Poktan dan gapoktan menjadi lebih kuat dan mandiri sehingga diharapkan akan tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani. Tahun 2020, jumlah poktan kelas lanjut sebanyak 3.573 poktan. Oleh karena itu pada tahun 2021 ditargetkan kenaikan poktan kelas lanjut sebanyak 10%. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi peningkatan poktan kelas lanjut hanya tercapai sebesar 4,87%. Pada tahun 2021 jumlah poktan kelas lanjut sebanyak 3.747 poktan (naik 4,87%) atau bertambah sebanyak 174 poktan. Jumlah kelompok tani tahun 2021 sebanyak 22.807 poktan terdiri dari kelas utama sebanyak 19 poktan, kelas madya sebanyak 316 poktan, kelas lanjut sebanyak 3.747 poktan, kelas pemula sebanyak 15.817 poktan dan sebanyak 2.899 poktan yang belum ada klasifikasinya.

Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian program yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.10.



Persentase Penggunaan Benih Bermutu (%)

Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat hasil tanaman adalah benih. Benih bersama sarana produksi lainnya seperti pupuk, air, cahaya, iklim menentukan tingkat hasil tanaman. Meskipun tersedia sarana produksi lain yang cukup, tetapi bila digunakan benih bermutu rendah maka hasilnya akan rendah. Benih bermutu mencakup mutu genetik, yaitu penampilan benih murni dari varietas tertentu yang menunjukkan identitas genetik dari tanaman induknya, mutu fisiologis yaitu kemampuan daya hidup (viabilitas) benih yang mencakup daya kecambah dan kekuatan tumbuh benih dan mutu fisik benih yaitu penampilan benih secara prima dilihat secara fisik seperti ukuran homogen, bernas, bersih dari campuran, bebas hama dan penyakit, dan kemasan menarik.

Untuk memproduksi benih bermutu harus memperhatikan beberapa aspek budidaya dari penyiapan lahan sampai panen, antara lain pengaturan jarak tanam, pemupukan, pengairan, perlindungan terhadap organisme pengganggu tanaman, *roguing* serta pemanenan. Untuk menghasilkan benih bermutu, budidaya tanaman diperlakukan berbeda dibanding untuk produksi. Jarak tanam dibuat lebih lebar agar antar tanaman tidak terjadi kompetisi, pemupukan harus dilakukan dengan tepat baik jenis, dosis dan konsentrasi, waktu dan frekuensi serta pemupukan agar pertumbuhan tanaman optimal, dan perlu dilakukan *roguing* yaitu pembuangan tanaman tipe simpang atau tanaman yang tidak dikehendaki misalnya gulma, jenis lain, kultivar lain akibat terjadinya segregasi, mutasi dan lain-lain. Biji yang sudah dipanen perlu dikeringkan sampai dengan kadar air tertentu (misalnya padi



13%, kedelai 11%), kemudian dilakukan pembersihan dan pemilahan.

Penggunaan benih bermutu dan bersertifikat tidak terlepas dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi persentase penggunaan benih bermutu pada tahun 2021 adalah sebesar 1,43% dari target sebesar 2%. Angka realisasi ini diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penggunaan benih padi unggul dalam satu tahun}}{\text{Luas total tanam padi dalam satu tahun}} \times 100\%$$

Sesuai rumus perhitungan di atas, komoditi yang digunakan sebagai ukuran untuk penggunaan benih bermutu hanya padi saja. Pada tahun 2021, penggunaan benih padi bermutu dan sertifikasi ditambah dengan bantuan benih dari program pusat adalah sebanyak 3.714,9 ton, sedangkan luas tanamnya adalah 259.886 ha. Dengan data ini diperoleh hasil perhitungan untuk penggunaan benih bermutu adalah 1,43%. Dibandingkan dengan targetnya sebesar 2%, capaian kinerja IKU ini hanya mencapai 71,5%. Adapun target, realisasi dan analisis singkat keterkaitan antara output kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian program yang dilaksanakan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih dapat dilihat pada Tabel 3.10.



Tabel 3.11 Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Penyuluh Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
PROGRAM PENYULUH PERTANIAN								
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah unit informasi teknis perbenihan yang diterapkan	5 Unit		5 Unit	100,00	Terlaksananya penerapan informasi teknis perbenihan melalui bimtek atau forum perbenihan.	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah dengan dilaksanakannya penerapan informasi teknis perbenihan melalui pertemuan bimtek atau forum perbenihan, kemampuan pelaku perbenihan akan semakin meningkat sehingga mampu mendukung petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Sertifikasi
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis dan inovasi perbenihan yang dilaksanakan	4 Unit		4 Unit	100,00	Terlaksananya koordinasi dengan PBT di lapangan untuk menentukan lokasi kegiatan Demonstrasi Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Demonstrasi Benih Unggul Bersertifikat Hortikultura, Bimtek Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Sekolah lapang Sertifikasi Benih Hortikultura.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan dilaksanakannya diseminasi informasi teknis dan inovasi perbenihan melalui kegiatan Dembul, Bimtek dan Sekolah Lapang, kemampuan pelaku perbenihan akan semakin meningkat sehingga mampu mendukung petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Sertifikasi
Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian ASN, penyuluh swadaya dan swasta yang dikembangkan kapasitasnya	202 Org		240 Org	118,81	Terlaksananya diklat bagi penyuluh pertanian ASN sebanyak 4 angkatan (120 orang) dan bagi swasta (non aparatur) sebanyak 4 angkatan (120 orang).	Kaitan kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas terhadap penyuluh pertanian ASN dan swasta (non aparatur) serta pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, akan dapat meningkatkan kompetensinya dalam mendukung petani meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan SDM
	Jumlah petani Poktan, KEP, BPP dan PPL berprestasi	5 Unit		12 Unit	240,00	Penilaian Penghargaan Tingkat Provinsi Tahun 2021 untuk 12 orang pemenang berdasarkan 4 (empat) kategori penghargaan antara lain: 1. Penyuluh Pertanian Teladan 2. Petani Berprestasi 3. BPP Berprestasi 4. Gapoktan Berprestasi		
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh ASN mengikuti peningkatan kapasitas	152 Org		148 Org	97,37	Jumlah penyuluh ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas melalui: - Demplot sebanyak 16 orang - Penerima Penghargaan sebanyak 12 orang - Diklat sebanyak 120 orang	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas terhadap penyuluh pertanian ASN akan dapat meningkatkan kompetensinya dalam mendukung petani meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan SDM

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat



Sambungan Tabel 3.11...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
						Demplot BPP bagi Penyuluh Pertanian sebanyak 16 unit di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, yaitu: Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Landak, Bengkayang dan Ketapang dengan rincian: 1. BPP Kec. Pontianak Utara (Padi dan Cabe) di Kota Pontianak; 2. BPP Kubu (Padi) dan BPP Rasau Jaya (Cabe) di Kab. Kubu Raya; 3. BPP Air Besar (Cabe), BPP Ngabang (Padi), BPP Mandor dan Sengah Temila (Jagung) di Kab. Landak; 4. BPP Mempawah Timur dan BPP Sungai Pinyuh (Padi) di Kab. Mempawah; 5. BPP Ledo dan BPP Tujuh Belas (Bawang Merah), BPP Lumar dan BPP Bengkayang (Jagung) di Kab. Bengkayang; 6. BPP Saja'ad (Cabe) di Kab. Sambas; dan 7. BPP Muara Pawan di Kab. Ketapang.		
						Penilaian Penghargaan Tingkat Provinsi Tahun 2021 untuk 12 orang pemenang berdasarkan 4 (empat) kategori penghargaan: 1. Penyuluh Pertanian Teladan (Mempawah, Singkawang & Kapuas Hulu); 2. Petani Berprestasi (Landak, Kayong Utara dan Ketapang); 3. BPP Berprestasi (Bengkayang, Kapuas Hulu Singkawang); dan 4. Gapoktan Berprestasi (Landak, Ketapang Singkawang).		
						Pelaksanaan Diklat Aparatur sebanyak 4 angkatan yaitu: - Diklat Pembelajaran Membuat Media Pembelajaran Inovatif Angkatan 1 dan 2 dengan total peserta 60 orang. - Diklat Metode dan Evaluasi Penyuluhan dengan peserta 30 orang - Diklat Teknologi Budi Daya Cabe dengan peserta 30 orang.		

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat



Sambungan Tabel 3.11...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah demplot kerjasama penyuluh swadaya dan swasta yang dilaksanakan	10 unit		10 unit	100,00	Terlaksananya Demplot Penyuluh Swadaya sebanyak 40 unit dengan rincian Kab. Mempawah 10 unit, Sambas 5 unit, Landak 10 unit, Bengkayang 10 unit dan Ketapang 5 unit.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya demplot kerjasama penyuluh swadaya dan swasta diharapkan memberikan kesempatan kepada setiap petani untuk terus maju dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan SDM
Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Poktan yang menerapkan inovasi teknologi	5 unit		5 unit	100,00	Terlaksananya penerapan inovasi teknologi kepada sejumlah kelompok tani dengan rincian sebagai berikut: Poktan Tani Makmur, Poktan Mandiri, Poktan Matang, Poktan Andalan Tani, dan Poktan KWT Lestari Dusun.	Kaitan kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya peningkatan kapasitas terhadap penyuluh pertanian ASN dan swasta (non aparatur) serta pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, akan dapat meningkatkan kompetensinya dalam mendukung petani meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Pengolahan Data dan Informasi
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian yang dilaksanakan	3 Kegiatan		3 Kegiatan	100,00	Dari 9 kegiatan, hanya 3 kegiatan yang terlaksana mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan monitoring evaluasinya antara lain: 1. Penyebaran Informasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik (2 kegiatan); 2. Identifikasi Materi Pertanian/Pengkajian. Sedangkan 6 kegiatan lainnya hanya sampai tahap persiapan saja. Tahap pelaksanaan dan seterusnya tidak dilaksanakan akibat adanya pemangkasan anggaran.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian diharapkan memberikan informasi kepada petani, kelompok tani, penyuluh, peneliti, penyampai program, generasi muda pertanian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan Balai Penyuluhan Pertanian dengan melakukan peran masing-masing untuk mewujudkan pencapaian pembangunan pertanian.	Kasi Pengolahan Data dan Informasi
		7 Kegiatan		7 Kegiatan		Terlaksananya persiapan kegiatan: 1. Demplot Penyuluh Provinsi dalam rangka Pengembangan Teknologi Cabe dan Padi (2 kegiatan); 2. Pembelajaran Teknologi Cabe dan Padi di BPP (2 kegiatan); 3. Penyebaran Informasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik (2 kegiatan); 4. Identifikasi Materi Pertanian/Pengkajian.		Kasi Pengolahan Data dan Informasi

Bersambung...



Sambungan Tabel 3.11...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
						<p>Terlaksananya demplot padi spesifik lokasi di 7 Kabupaten/Kota (Ketapang, Bengkayang, Sintang, Melawi, Landak, Mempawah, dan Kota Singkawang).</p> <p>Terlaksananya demplot cabe di 3 Kabupaten (Sekadau, Kapuas Hulu dan Kayong Utara).</p>		
		2 Kegiatan		2 Kegiatan		<p>Terlaksananya kegiatan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Penyuluhan Masuk Sekolah 2. Pembelajaran Hidroponik di Sekolah <p>Terlaksananya tahap persiapan penerima kegiatan berdasarkan surat pernyataan kesediaan menerima kegiatan sebanyak 10 unit di sekolah.</p> <p>Terlaksananya tahap persiapan kegiatan Distribusi Fasilitasi seperangkat rangkaian Hydroponik beserta praktek pembelajaran sebanyak 10 unit.</p>		Kasi Kelembagaan dan Pengembangan SDM Penyuluhan
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	14 Dokumen		7 Dokumen	50,00	Terlaksananya pelatihan teknis bagi Penyuluh lokasi READSI (3 dokumen) dan Temu Koordinasi READSI (3 dokumen).	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya pelatihan, pertemuan, evaluasi dan pembinaan diharapkan memberikan kesempatan kepada setiap petani untuk terus maju dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya	Kasi Penyuluhan
						<p>Terlaksananya pelatihan teknis bagi Penyuluh lokasi READSI (6 angkatan masing masing 20 orang) untuk Kabupaten Sambas dan Sanggau. Realisasi sebanyak 3 dokumen.</p> <p>Terlaksananya Temu Koordinasi READSI (4 kali 4 triwulan) dilaksanakan untuk TIM Province Project Support Unit (PPSU Kalbar) dan DPMO (Sambas dan Sanggau). Realisasi sebanyak 3 dokumen.</p> <p>Kajian Evakuasi non Farm Skema Peluang Pasar di lokasi READSI Sambas dan Sanggau, tidak terlaksana.</p>		

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat



Sambungan Tabel 3.11...

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
						Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kerja LAKUSUSI (Kabupaten Mempawah, Landak, Bengkayang dan Kota Singkawang), tidak terlaksana akibat pemangkasan anggaran.		
						Gerakan Pemberdayaan Petani mendukung Pembangunan Pertanian (5 BPP di BPP Selakau, BPP Semparuk, BPP Sejangkung, BPP Tayan Hilir dan BPP Kapuas), tidak terlaksana akibat pemangkasan anggaran.		
						Forum dan Penyusunan Program pada 14 Kab/Kota, tidak terlaksana akibat pemangkasan anggaran.		
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang berkembang	7 unit		10 unit	142,86	Indikator sub kegiatan yang terlaksana hanya jumlah kelompok tani yang mengikuti Sekolah Lapang sebanyak 10 unit. Sub kegiatan lain mengalami pemangkasan anggaran.	Kaitan kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan berkembangnya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkatkan kompetensi petani untuk terus maju dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan SDM
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah koperasi petani yang difasilitasi	10 unit		0 unit		Seluruh sub kegiatan ini mengalami pemangkasan anggaran, sehingga tidak ada capaian kinerjanya.	-	Kasi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan SDM
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah kelompok tani mengikuti Sekolah Lapang	40 unit		10 unit	100,00	Terlaksananya Demplot Sekolah Lapang (SL) Kelompok Tani sebanyak 10 Unit yaitu Kota Pontianak, Landak, Bengkayang, Sanggau dan Sintang. Akibat pemangkasan anggaran, target awal 40 unit berubah menjadi 10 unit. Namun karena kurang teliti, belum dilakukan perubahan target. Dengan demikian capaian kinerja untuk sub kegiatan ini sebenarnya adalah 100%.	Kaitan sub kegiatan terhadap keberhasilan program adalah dengan dilaksanakannya Sekolah Lapang (SL) dapat meningkatkan kompetensi petani untuk terus maju dan berkembang dalam meningkatkan kesejahteraannya.	Kasi Kelembagaan, Ketenagaan dan Pengembangan SDM
						Terlaksananya demplot Sekolah Lapang kelompok tani sebanyak 10 unit dengan rincian BPP Kota Pontianak (Poktan Tani Makmur), BPP Selakau Timur (Poktan Mandiri), BPP Jawai Selatan (Poktan Matang) di Kab. Sambas, BPP Toba (Poktan Andalan Tani) dan BPP Parindu (Poktan KWT Lestari Dusun) di Kab. Sanggau, BPP Kuala Behe (Poktan Desa Nayum) dan BPP Jelimpo di Kab. Landak, BPP Tempunak di Kab. Sintang, BPP di Kab. Bengkayang dan BPP Teriak di Kab. Landak.		

**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN****Persentase peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan (%)**

Investasi adalah bagian sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional termasuk sektor pertanian. Pemerintah telah berupaya untuk mendorong perkembangan investasi baik untuk pengusaha dalam maupun luar negeri dengan berbagai kebijakan dan regulasi. Namun informasi mengenai peluang usaha/investasi di wilayah/daerah yang memberikan prospek yang baik masih terbatas. Selain itu, informasi tentang calon penanam modal yang akan berinvestasi khususnya pada sektor pertanian khususnya bidang tanaman pangan dan hortikultura juga sangat penting.

Dengan terbitnya PP Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri Pertanian juga membuat regulasi untuk mendukung PP tersebut dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Syarat, Tata Cara dan Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi Teknis Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal serta menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

Capaian kinerja peningkatan pertimbangan teknis untuk usaha pertanian yang diterbitkan baru ada di tahun 2021 sehingga



tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun 2020 atau beberapa tahun sebelumnya. Meskipun tidak bisa dibandingkan, peningkatan terhadap capaian kinerjanya dapat dihitung dengan data-data yang dimiliki pada tahun 2020. Pada tahun 2020, pertimbangan teknis yang diterbitkan sebanyak 34 dokumen sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 36 dokumen. Artinya ada penambahan jumlah pertimbangan teknis sebanyak 2 dokumen atau meningkat sebesar 5,88% dibandingkan dengan tahun 2020. Target peningkatan di tahun 2021 adalah sebesar 10% sementara hanya terelisasi sebesar 5,88%. Dengan demikian, capaian kinerja dari IKU ini hanya tercapai 58,8%.



Tabel 3.12 Matriks Kegiatan/Sub Kegiatan, Target dan Realisasi Keluaran beserta Analisis Singkat Kaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Mendukung Capaian Program Perizinan Usaha Pertanian

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan		Realisasi s.d. Desember 2021	Capaian Kinerja (%)	Hasil Kegiatan/Sub Kegiatan	Justifikasi dan Analisis Kaitan Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan Keberhasilan Program	Penanggung Jawab
		Target	Satuan					
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN								
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatannya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian (Rekomendasi Teknis) yang diterbitkan	85 Unit		85 Unit	100,00	Terlaksananya rekomendasi teknis terhadap Izin Usaha Pertanian sebelum diterbitkan.	Kaitan kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya penerbitan atas Izin Usaha Pertanian diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan produsen/pedagang benih dalam mendukung peningkatan indeks petani untuk kesejahteraannya.	Kasi Pengawasan Pemasaran Benih
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Produsen/Pedagang Benih yang dinilai kelayakannya dan diberikan pertimbangan teknis	24 Orang		24 Orang	100,00	Terlaksananya penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis untuk produsen/pedagang benih.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya penilaian, uji kelayakan dan pertimbangan teknis terhadap produsen/pedagang benih, akan menjadi jaminan dalam menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat guna mendukung peningkatan indeks petani untuk kesejahteraannya.	Kasi Pengawasan Pemasaran Benih
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Produsen/Pedagang Benih yang dibina dan diawasi Izin Usahanya	37 Orang		37 Orang	100,00	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha produsen/pedagang benih.	Kaitan sub kegiatan terhadap capaian program adalah dengan terlaksananya pembinaan dan pengawasan izin usaha para produsen/pedagang benih, akan menjadi jaminan dalam menghasilkan benih bermutu dan bersertifikat guna mendukung peningkatan indeks petani untuk kesejahteraannya.	



2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

a. Perbandingan Realisasi NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB

No.	Indikator Tujuan Strategis	Realisasi Capaian				Rerata 2018-2020	% naik/turun 2021 terhadap	
		2018	2019	2020	2021		Rerata	2020
1	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	9,80	4,58	-5,91	-5,55	2,82	-296,58	-6,09
2	Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	4,96	5,47	6,16	1,92	5,53	-65,28	-68,83
3	NTP Tanaman Pangan dan Palawija	100,00	100,11	96,92	94,17	99,01	-4,89	-2,84
4	NTP Hortikultura	100,00	99,44	99,05	104,87	99,50	5,40	5,88

- Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2022 (BPS)
- Keterangan : Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2021 menggunakan Angka Sangat Sementara sedangkan tahun 2020 masih menggunakan Angka Sementara.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja eselon II tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Hanya NTP Hortikultura yang mengalami peningkatan sebesar 5,88%. Sedangkan untuk NTP Tanaman Pangan tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Kondisi ini berarti bahwa indeks harga yang diterima petani tanaman pangan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang harus dibayarkan oleh petani. Penurunan indeks harga yang diterima disebabkan turunnya permintaan dan harga serta produksi tanaman pangan.

Adapun untuk Laju Pertumbuhan PDRB (Angka Sangat Sementara) sub sektor tanaman pangan dan hortikultura tahun 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. Kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan dan kegiatan ekonomi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura tahun 2021 cenderung



menurun. Masa pandemi menjadi penghambat umum pertumbuhan ekonomi tidak hanya sektor pertanian namun juga pada sektor lain. Perbandingan realisasi capaian 2021 dengan beberapa tahun terakhir (2018-2020) dapat dilihat pada Tabel 3.13.

b. Perbandingan Realisasi Produksi Tanaman Pangan

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Produksi Tanaman Pangan

No.	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Capaian				Rerata 2018-2020	% naik/turun 2021 terhadap	
		2018	2019	2020	2021		Rerata	2020
1	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	995.246	1.091.154	1.031.669	988.261	1.039.357	-4,92	-4,21
	- Padi	799.715	847.875	778.170	776.797	808.587	-3,93	-0,18
	- Jagung	195.531	243.279	253.499	211.464	230.770	-8,37	-16,58

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tabel 3.15 Perbandingan Produktivitas dan Luas Panen Padi dan Jagung

No.	Indikator Sasaran Program Pendukung	Realisasi Capaian				Rerata 2018-2020	% naik/turun 2021 terhadap	
		2018	2019	2020	2021		Rerata	2020
1	Produktivitas padi (ku/ha)	27,92	29,23	30,33	31,38	29,16	7,63	3,48
2	Produktivitas jagung (ku/ha)	38,95	47,69	47,45	47,45	44,70	6,16	0,01
3	Luas panen padi (ha)	286.476	290.048	256.575	247.510	277.700	-10,87	-3,53
4	Luas panen jagung (ha)	50.194	51.009	53.428	43.919	51.544	-14,79	-17,80

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2020, berdasarkan ATAP 2020 produksi padi sebesar 778.170 ton sedangkan menurut ASEM tahun 2021 produksi padi sebesar 776.797 ton atau mengalami penurunan sebesar 0,18%. Hal ini disebabkan karena turunnya luas panen padi pada tahun 2021 sebesar 3,53 %. Adapun penurunan luas panen disebabkan adanya pergeseran jadwal tanam dan bencana banjir di beberapa wilayah pada triwulan IV sehingga banyak lahan menjadi puso. Di sisi lain, meskipun terjadi penurunan luas panen padi namun terjadi peningkatan produktivitas menjadi 31,38 ku/ha pada tahun 2021



atau meningkat sebesar 3,48% dari produktivitas padi tahun 2020 (30,33 ku/ha). Sedangkan untuk produksi jagung mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 42.035 ton atau berkurang sebesar 16,58%. Hal ini diiringi dengan menurunnya luas panen seluas 9.509 ha atau berkurang sekitar 17,8%. Meskipun demikian, produktivitas cenderung stabil dan meningkat sekitar 0,01%. Perbandingan realisasi capaian 2021 dengan beberapa tahun terakhir (2018-2020) dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan Tabel 3.15.

c. Perbandingan Realisasi Produksi Hortikultura

Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Produksi Hortikultura

No.	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Capaian				Rerata 2018-2020	% naik/turun 2021 terhadap	
		2018	2019	2020	2021		Rerata	2020
2	Jumlah produksi hortikultura (ton)	405.678	470.887	564.345	574.264	480.303	19,56	1,76
	- Buah-buahan	332.186	399.326	491.126	494.321	407.546	21,29	0,65
	- Sayuran	61.238	48.533	50.641	59.720	53.471	11,69	17,93
	- Obat	12.254	23.028	22.577	20.223	19.286	4,86	-10,43

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada tabel di atas dapat dilihat perbandingan produksi tanaman hortikultura tahun 2020 dan Angka Sangat Sementara Tahun 2021. Jumlah produksi tanaman hortikultura tahun 2021 secara keseluruhan meningkat sebesar 1.76% (9.919 ton). Komoditas yang paling banyak meningkat produksinya adalah tanaman sayuran sebanyak 9.091 ton (17,93%) dilanjutkan dengan buah-buahan yang meningkat sebesar 3.195 ton (0,65%). Sementara untuk tanaman obat mengalami penurunan sebanyak 2.354 ton (10,43%). Perbandingan realisasi capaian 2021 dengan beberapa tahun terakhir (2018-2020) dapat dilihat pada Tabel 3.16.



d. *Perbandingan Realisasi Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura*

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Indeks yang diterima petani

No.	Indikator Tujuan Strategis	Realisasi Capaian				Rerata 2018-2020	% naik/turun 2021 terhadap	
		2018	2019	2020	2021		Rerata	2020
1	Indeks Harga yang diterima Petani	100,00	101,91	103,16	106,38	101,69	4,61	3,12

Sumber : BPS Kalimantan Barat

Berdasarkan tabel di atas, indeks yang diterima petani tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,12% dibanding tahun 2020, sementara perbandingan dengan beberapa tahun sebelumnya juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,61%. Realisasi indeks tersebut diperoleh dari rata-rata jumlah indeks yang diterima petani dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura.

3. **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019-2021 dengan Target Tahun 2022**

a. *Perbandingan Rata-rata Capaian Realisasi NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target tahun 2022*

Tabel 3.18 Perbandingan Rata-rata Capaian NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019-2021 dengan Target Tahun 2021

No.	Indikator Tujuan Strategis	Realisasi Capaian			Rerata 2019-2021	Target 2022	% Rerata Capaian terhadap Target 2022	% GAP Rerata Capaian terhadap Target 2022
		2019	2020	2021				
1	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	4,58	-5,91	-5,55	-2,29	4,14-4,82	out of range	-155,39
2	Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	5,47	6,16	1,92	4,52	6,76-8,95	out of range	-33,19
3	NTP Tanaman Pangan dan Palawija	100,11	96,92	94,17	97,07	95,14	102,03	2,03
4	NTP Hortikultura	99,44	99,05	104,87	101,12	101,90	99,23	-0,77

Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2022 (BPS)



Dari tabel di atas dapat dilihat rata-rata capaian NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB tanaman pangan dan hortikultura tahun 2019-2021 terhadap target tahun 2022. Untuk NTP Tanaman Pangan, *gap* antara target tahun 2022 dan rata-rata capaian 2019-2021 bernilai positif, artinya rata-rata capaian 2019-2021 sudah lebih tinggi dari target 2022. Demikian pula persentase rata-rata capaian tahun 2019-2021 terhadap target 2022 di atas 100% (102,03%). Kondisi terjadi karena adanya penyesuaian target dalam rangka perubahan dokumen perencanaan baik RPJMD maupun Renstra Tahun 2018-2023. Perubahan dokumen perencanaan dan penyesuaian target kinerja akibat adanya kondisi ekstrem pandemi *covid-19*. Adapun untuk NTP Hortikultura, *gap* antara target 2022 dengan rata-rata capaian tahun 2019-2021 bernilai negatif (-0,77%) dan persentase rata-rata capaian tahun 2019-2021 terhadap target tahun 2022 di bawah 100% (99,23%). Ini berarti target 2022 lebih tinggi dari rata-rata capaian tahun sebelumnya, sehingga diperlukan upaya yang cukup besar untuk pencapaiannya. Adapun untuk Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan, rata-rata capaian tahun 2019-2021 lebih rendah dari kisaran target tahun 2022 atau *out of range*. Sama halnya dengan Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura, rata-rata capaian tahun 2019-2021 juga berada di bawah kisaran target tahun 2022.

b. *Perbandingan Rata-rata Capaian Produksi Tanaman Pangan dengan target tahun 2022*

Pada Tabel 3.19 berikut dapat dilihat persentase rata-rata capaian produksi tanaman pangan tahun 2019-2021 terhadap target tahun 2022 adalah 91,26%. Perbandingan/*gap* rata-rata capaian 2019-2021 terhadap target 2022 bernilai negatif artinya target tahun 2022 lebih tinggi dari rata-rata capaian 2019-2021 sehingga diperlukan upaya yang cukup besar untuk meningkatkan pencapaian target produksi tanaman pangan di tahun 2022.



Tabel 3.19 Perbandingan Rata-rata Capaian Produksi Tanaman Pangan Tahun 2019-2021 dengan Target Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Capaian			Rerata 2019-2021	Target 2022	% Rerata Capaian terhadap Target 2022	% GAP Rerata Capaian terhadap Target 2022
		2019	2020	2021				
1	Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.091.154	1.031.669	988.261	1.037.028	1.136.315	91,26	-8,74
	- Padi	847.875	778.170	776.797	800.948	886.605	90,34	-9,66
	- Jagung	243.279	253.499	211.464	236.081	249.710	94,54	-5,46

Keterangan: Capaian padi 2021 (ASEM) dan jagung 2021 (ARAM)

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2021, diolah

Target capaian tahun 2022 dapat dipenuhi dengan asumsi sebagai berikut:

- untuk komoditas padi terjadi *gap* sebesar -9,66% artinya diperlukan peningkatan produksi padi sebanyak 85.657 ton atau sebesar 10,69% dari rata-rata capaian produksi padi tahun 2019-2021 atau diperlukan peningkatan produksi padi sebanyak 109.808 ton atau sebesar 14,14% dari capaian produksi tahun 2021;
- untuk komoditas jagung, diperlukan peningkatan produksi sebanyak 13.629 ton atau sebesar 5,77% dari rata-rata produksi jagung tahun 2019-2021 atau diperlukan peningkatan produksi jagung sebanyak 38.246 ton atau sebesar 18,09% dari produksi jagung tahun 2021.

c. Perbandingan Rata-rata Capaian Produksi Hortikultura dengan target tahun 2022

Pada Tabel 3.20 berikut dapat dilihat persentase rata-rata capaian produksi hortikultura tahun 2019-2021 terhadap target tahun 2022 adalah 104,26%. Perbandingan/*gap* rata-rata capaian 2019-2021 terhadap target 2022 bernilai positif artinya target tahun 2022 lebih rendah dari rata-rata capaian 2019-2021 sehingga tidak diperlukan upaya yang cukup besar untuk meningkatkan pencapaian target produksi hortikultura di tahun 2022.

**Tabel 3.20 Perbandingan Rata-rata Capaian Produksi Hortikultura Tahun 2019-2021 dengan Target Tahun 2022**

No.	Indikator Sasaran Strategis	Realisasi Capaian			Rerata 2019-2021	Target 2022	% Rerata Capaian terhadap Target 2022	% GAP Rerata Capaian terhadap Target 2022
		2019	2020	2021				
2	Jumlah produksi hortikultura (ton)	470.887	564.345	574.264	536.498	514.565	104,26	4,26
	- Buah-buahan	399.326	491.126	494.321	461.591	436.360	105,78	5,78
	- Sayuran	48.533	50.641	59.720	52.965	53.045	99,85	-0,15
	- Obat	23.028	22.577	20.223	21.943	25.160	87,21	-12,79

Keterangan: *Capaian 2021 (ASEM)*

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2021, diolah

Target capaian tahun 2022 dapat dipenuhi dengan asumsi sebagai berikut:

- untuk komoditas buah-buahan, ada *gap* sebesar 5,78%, artinya tidak diperlukan upaya yang besar untuk peningkatan produksi buah-buahan di tahun 2022;
- untuk komoditas sayuran, ada *gap* -0,15%, artinya diperlukan peningkatan produksi sebanyak 80 ton (0,15%) dari rata-rata capaian tahun 2019-2021 atau tidak diperlukan upaya yang besar untuk peningkatan produksi sayuran di tahun 2022;
- untuk komoditas obat (biofarmaka), ada *gap* sebesar -12,79%, artinya diperlukan peningkatan produksi sebanyak 3.217 ton atau sebesar 14,66% dari rata-rata capaian tahun 2019-2021 atau diperlukan peningkatan produksi sebanyak 4.937 ton atau sebesar 24,41% dari capaian produksi tahun 2021.

d. Perbandingan Rata-rata Capaian Indeks yang diterima oleh Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan target tahun 2022

Pada Tabel 3.21 berikut dapat dilihat persentase rata-rata capaian Indeks yang diterima oleh Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2019-2021 terhadap target tahun 2022 adalah 101,39%. Perbandingan/*gap* rata-rata capaian 2019-2021 terhadap target 2022



bernilai positif artinya target tahun 2022 lebih rendah dari rata-rata capaian 2019-2021. Ini berarti semakin tinggi indeks yang diterima oleh petani, maka semakin tinggi nilai produksi yang dihasilkan oleh petani, sehingga kesejahteraan petani juga semakin meningkat.

Tabel 3.21 Perbandingan Rata-rata Capaian Indeks yang diterima oleh petani tahun 2019-2021 dengan target tahun 2022

No.	Indikator Tujuan Strategis	Realisasi Capaian			Rerata 2019-2021	Target 2022	% Rerata Capaian terhadap Target 2022	% GAP Rerata Capaian terhadap Target 2022
		2019	2020	2021				
1	Indeks Harga yang diterima Petani	101,91	103,16	106,38	103,82	102,39	101,39	1,39

Sumber: BPS Kalimantan Barat

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kendala utama dalam pencapaian kinerja tahun 2021 adalah adanya masa pandemi *covid-19* yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan masih berlanjut sampai dengan akhir tahun 2021. Pandemi *covid-19* berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat termasuk pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Secara khusus terdapat beberapa hambatan dan kendala dimana permasalahan tersebut telah dirangkum sebagai berikut:

1. Kebijakan

- Kebijakan terkait anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang terkendala, salah satunya disebabkan oleh pandemi *covid-19*, sehingga pemangkasan anggaran beberapa kali dilakukan. Hal ini tentu menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Pemangkasan banyak dibebankan pada biaya perjalanan dinas, biaya makan-minum rapat atau kegiatan lain yang menyebabkan potensi



berkumpulnya orang-orang. Dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di beberapa wilayah juga menjadi kendala untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di luar kota. Selama tahun 2022 terjadi beberapa kali revisi anggaran hingga menjadi DPPA yang baru disahkan tanggal 5 November 2021. Hal ini menyebabkan pencairan dan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat karena transaksi keuangan dikunci oleh operator, kecuali honorarium tenaga kontrak yang menyangkut penggajian staf.

- Kebijakan terkait data, data indikator kinerja utama baik penentuan target maupun pencapaiannya IKU terkait NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dimana sumber datanya berasal dari BPS. Data rilis BPS biasanya baru keluar akhir bulan Februari, sedangkan pelaporan di bulan Januari. Di sisi lain, komponen penghitungan NTP dan Laju Pertumbuhan PDRB sangat bergantung pada sub sektor lain. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sendiri hanya memiliki intervensi terkait sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Komponen lain (harga) yang tidak bisa dikendalikan juga menjadi penyebab tidak tercapainya kinerja. Sedangkan untuk sasaran strategis jumlah produksi hortikultura mencakup semua komoditas yang jumlah jenisnya mencapai ratusan jenis, tidak fokus pada komoditas tertentu. Sedangkan sasaran program/kegiatan hanya menasar pada komoditas tertentu (komoditas potensial di Kalimantan Barat).

2. *Budaya, Kelembagaan dan Organisasi Tani*

- Orientasi petani cenderung untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten) dan masih sering ketergantungan pada bantuan pemerintah;
- Kelompok tani yang didominasi kelas pemula sebanyak 15.817 poktan (69,35%);



- Kapasitas poktan dan gapoktan serta UPJA belum berfungsi optimal; dan
- Kualitas Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi) belum memadai.

3. *Pemanfaatan Sumberdaya Lahan*

- Pemanfaatan potensi lahan sawah masih belum optimal. Dari luas lahan sawah di Kalimantan Barat seluas 242.972 ha, yang dimanfaatkan sebagai sawah dengan penanaman 2 kali atau lebih hanya seluas 172.455 ha (70,98%) dan sisanya seluas 70.517 ha (29,02%) masih dimanfaatkan untuk 1 kali tanam; dan
- Ancaman konversi lahan sawah ke komoditi non padi maupun alih fungsi dari sawah ke non pangan.

4. *Infrastruktur Pengairan dan Alsintan (Alat Mesin Pertanian)*

- Keterbatasan infrastruktur seperti JITUT, JIDES, JUT, saluran drainase dan pintu air. Infrastruktur yang ada sebagian juga mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi optimal; dan
- Ketersediaan dan sebaran alsintan belum memadai. Ketersediaan alsin pengolahan tanah berdampak pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Keterbatasan alsin pasca panen seperti *power thresher* menyebabkan petani harus antri untuk panen, terkadang terlambat sehingga kualitas produksi yang dihasilkan menurun. Alsин pasca panen berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas melalui penekanan kehilangan hasil maupun meningkatkan kualitas hasil yang berpengaruh pada harga jual produk.

5. *Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Usaha Tani*

- Kapasitas dan jumlah penyuluh pertanian belum memadai;
- Fungsi penyuluhan belum optimal, akibatnya transfer teknologi budidaya ke petani belum berjalan optimal, sehingga sistem budidaya sebagian masih konvensional;



- Sistem pemupukan berimbang (asas 6 tepat) belum diterapkan dengan baik;
- Penggunaan benih lokal masih tinggi (>20%), ketersediaan benih dari produsen lokal masih sangat terbatas; dan
- Sebagian petani belum menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) sehingga masih terjadi serangan OPT.

6. *Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil*

- Tingkat kehilangan hasil (*losses*) relatif masih tinggi akibat masih kurangnya ketersediaan asin pasca panen;
- SDM petani dalam penganekaragaman hasil masih terbatas, agroindustri yang ada di Kalimantan Barat sebagian besar masih bersifat *home industry* sehingga sangat diperlukan investor untuk pengembangan dalam skala luas;
- Belum jelasnya *value chain* berbagai komoditas strategis sehingga perkembangan agribisnis lambat sehingga pemasaran sebagian besar masih dilakukan secara perorangan, tidak melalui kelompok atau suatu badan usaha; dan
- Terjadinya inefisiensi pemasaran dan tingginya margin harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh rantai tata niaga yang panjang sehingga keuntungan petani tidak optimal.

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh untuk mengatasi beberapa masalah yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran strategis secara berlanjut sebagai berikut:

1. *Kebijakan*

- Penyusunan perencanaan dan aturan pelaksanaan program yang fleksible, aman meminimalkan revisi-revisi yang mengakibatkan kendala pelaksanaan program secara administrasi; dan



- Koordinasi antar internal dinas terkait Indikator Kinerja Utama, dan konsultasi dengan pihak yang kompeten dan memiliki kewenangan penentuan IKU serta pembahasan dan transparansi data lebih detail terkait kebijakan harga (komponen data NTP).
2. *Budaya, Kelembagaan dan Organisasi Tani*
- Bimtek dan diklat yang dapat merubah paradigma petani dari subsisten ke agribisnis serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah;
 - Pembinaan dan pengembangan kapasitas poktan;
 - Peningkatan dan pembinaan kapasitas poktan/gapoktan melalui diklat pertanian agar poktan kuat, mandiri dan berkembang, serta optimalisasi fungsi UPJA; dan
 - Peningkatan kualitas Kelembagaan Ekonomi Petani (Koperasi), mendapatkan penghargaan tingkat nasional.
3. *Pemanfaatan Sumber Daya Lahan*
- Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lokasi lahan-lahan yang berpotensi segera untuk dinaikkan indeks pertanamannya. Perlu adanya analisis kebutuhan sarana dan prasarana pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan indeks pertanaman; dan
 - Tindak lanjut dari penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pengembangan *food estate* yang lebih terencana dan terpadu.
4. *Infrastruktur dan Alsintan*
- Melakukan inventarisasi ketersediaan jaringan pengairan baik dari jumlah maupun kondisi di lapangan. Hasil inventarisasi sangat penting sebagai dasar perencanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan agar dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi. Pada tahun 2021 upaya mengoptimalkan potensi lahan sawah dilakukan



melalui kegiatan pengelolaan air di tingkat usaha tani berupa diantaranya pembangunan 1 unit pintu air.

- Penyediaan alsintan berupa *handtractor* dan *cultivator* baik melalui dana APBN maupun APBD, serta meningkatkan pemberdayaan UPJA di kelompok tani melalui pelatihan. Pengembangan alsin pasca panen yang diprioritaskan pada wilayah sentra produksi padi dan jagung berupa *power thresher*, *corn sheller*, *dryer* dan RMU.

5. *Penyuluhan dan Penerapan Teknologi Usaha Tani*

- Penyelenggaraan diklat, bimtek, program *Read-si* untuk peningkatan kapasitas penyuluh dan sdm pertanian lainnya;
- Optimalisasi peran dan fungsi penyuluhan, BPP, serta sistem LAKUSUSI, dan pembinaan penyuluh swadaya;
- Penerapan pemupukan berimbang melalui pengembangan kawasan padi, jagung dan aneka kacang/umbi melalui dana APBD berupa bantuan sarana produksi pupuk, pestisida dan pembenah tanah, dan lain-lain pada 14 kabupaten/kota; dan
- Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SL-I) serta Gerakan Pengendalian.

6. *Penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil*

- Optimalisasi jumlah dan fungsi alsin pasca panen berupa *power thresher* (padi), *corn sheller* (jagung) untuk mengurangi kehilangan hasil (*losses*) saat perontokkan;
- Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan yang intensif bagi petani serta memfasilitasi pertemuan petani dengan pengusaha/*stake holders* misalnya event pameran, kontes durian, sehingga terjalin kemitraan yang saling menguntungkan terutama dalam penyediaan modal usaha maupun pemasaran hasil;



- Pengembangan pemasaran hasil melalui kelompok/ suatu badan usaha, sehingga pemasaran tidak hanya bersifat domestik tetapi memiliki akses ke luar daerah; dan
- Kebijakan harga, pengaturan pola panen dan budidaya serta rencana pembentukan kelembagaan korporasi petani.

5. *Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target dan Kinerja Secara Nasional*

Terdapat perbedaan indikator kinerja antara Renstra Kementerian dengan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, sehingga capaian kinerja tidak bisa dibandingkan. Indikator Kementerian bukan produksi, namun terkait dengan nilai produksi dan kapasitas ekspor produksi pertanian.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat mengalokasikan anggaran sasaran strategis dari APBD Tahun 2021 sebesar Rp 23.687.858.658 dan terealisasi sebesar Rp 18.928.188.338 atau 79,91% dari pagu anggaran.

Adapun pagu dan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis *corebusiness* dan target kinerja antara Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat ditampilkan pada tabel berikut:



Tabel 3.22 Pagu dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Corebusiness Tahun Anggaran 2021

NO	DINAS / UPT / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN AKHIR					
			APED Penyempurnaan (Rp)	Realisasi APED Penyempurnaan		APED Perubahan (Rp)	Realisasi APED Perubahan	
				(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL ANGGARAN STRATEGIS DINAS DAN UPT		29.901.113.656	4.299.924.956	4.237.068.873	98,54	23.687.858.658	18.928.188.338	79,91
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		8.789.402.795	1.241.098.273	1.208.667.403	97,39	5.311.192.149	5.159.962.712	97,15
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		15.126.874.736	2.458.490.533	2.440.705.176	99,28	14.906.735.565	11.174.199.853	74,96
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana		1.046.110.937	307.142.474	305.913.881	99,60	378.505.896	368.951.413	97,48
Program Perizinan Usaha Pertanian		242.247.629	43.162.422	37.319.728	86,46	79.847.207	54.211.107	67,89
Program Penyuluh Pertanian		4.696.477.559	250.031.254	244.462.685	97,77	3.011.577.841	2.170.863.253	72,08
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR		15.034.954.285	631.928.610	616.760.057	97,60	12.826.108.716	11.537.720.417	89,95
02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		5.736.008.705	135.347.360	133.005.680	98,27	3.791.372.345	3.703.251.255	97,68
1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		391.999.925	-	-	-	77.944.925	52.445.225	67,28
01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian		237.939.500	-	-	-	42.557.500	34.921.800	82,06
02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		154.060.425	-	-	-	35.387.425	17.523.425	49,52
1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		5.344.008.780	135.347.360	133.005.680	98,27	3.713.427.420	3.650.806.030	98,31
02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		2.135.539.040	51.171.680	50.121.090	97,95	1.786.367.360	1.748.145.088	97,86
03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan		3.208.469.740	84.175.680	82.884.590	98,47	1.927.060.060	1.902.660.942	98,73

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.22 ...

NO	DINAS / UPT / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN AKHIR					
			APED Penyempurnaan (Rp)	Realisasi APED Penyempurnaan (%)		APED Perubahan (Rp)	Realisasi APED Perubahan (%)	
				4	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.762.759.383	259.783.480	252.525.176	97,21	6.062.573.465	5.699.852.744	94,02
1.01	Penataan Prasarana Pertanian	5.762.759.383	259.783.480	252.525.176	97,21	6.062.573.465	5.699.852.744	94,02
	01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.810.375.740	8.468.000	6.200.000	73,22	3.137.094.002	3.054.076.152	97,35
	02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.252.119.938	148.972.120	146.082.997	98,06	1.004.473.068	815.684.045	81,21
	03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	523.663.955	38.378.760	37.590.817	97,95	136.789.195	106.570.075	77,91
	04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	105.769.520	25.585.840	25.060.545	97,95	58.491.680	55.301.044	94,55
	09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2.070.830.230	38.378.760	37.590.817	97,95	1.725.725.520	1.668.221.428	96,67
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.536.186.197	236.797.770	231.229.201	97,65	2.972.162.906	2.134.616.418	71,82
1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	771.249.710	24.723.865	22.549.401	91,20	917.430.600	847.972.843	92,43
	01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	525.168.535	10.231.690	10.021.626	97,95	715.196.600	653.248.843	91,34
	02 Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	246.081.175	14.492.175	12.527.775	86,45	202.234.000	194.724.000	96,29
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	2.464.023.397	195.264.705	193.452.000	99,07	1.899.272.306	1.139.923.575	60,02
	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1.073.152.530	86.000.000	86.000.000	100,00	354.006.075	343.230.675	96,96
	02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	1.390.870.867	109.264.705	107.452.000	98,34	1.545.266.231	796.692.900	51,56

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.22 ...

NO	DINAS / UPT / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN AKHIR					
			APBD Penyempurnaan (Rp)	Realisasi APBD Penyempurnaan (%)		APBD Perubahan (Rp)	Realisasi APBD Perubahan (%)	
				4	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani	300.913.090	16.809.200	15.227.800	90,59	155.460.000	146.720.000	94,38
	01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani	100.677.890	-	-	-	-	-	-
	04 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	200.235.200	16.809.200	15.227.800	90,59	155.460.000	146.720.000	94,38
	UPT PEMBENIHAN TANAMAN PANGAN	10.636.438.118	2.586.738.137	2.554.626.895	98,76	10.182.227.296	6.781.889.037	66,61
	02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.272.322.765	388.031.084	366.446.895	94,44	1.338.065.196	1.307.541.928	97,72
	1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.272.322.765	388.031.084	366.446.895	94,44	1.338.065.196	1.307.541.928	97,72
	02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	-	-	-	-	590.250.310	579.826.870	98,23
	03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	1.272.322.765	388.031.084	366.446.895	94,44	747.814.886	727.715.058	97,31
	03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	9.364.115.353	2.198.707.053	2.188.180.000	99,52	8.844.162.100	5.474.347.109	61,90
	1.01 Penataan Prasarana Pertanian	9.364.115.353	2.198.707.053	2.188.180.000	99,52	8.844.162.100	5.474.347.109	61,90
	10 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	9.364.115.353	2.198.707.053	2.188.180.000	99,52	8.844.162.100	5.474.347.109	61,90

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.22 ...

NO	DINAS / UPT / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN AKHIR					
			APBD Penyempurnaan (Rp)	Realisasi APBD Penyempurnaan		APBD Perubahan (Rp)	Realisasi APBD Perubahan	
				(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1.051.377.237	307.142.474	305.913.881	99,60	383.772.196	373.456.413	97,31
	02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.266.300	-	-	-	5.266.300	4.505.000	85,54
	1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.266.300	-	-	-	5.266.300	4.505.000	85,54
	01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	5.266.300	-	-	-	5.266.300	4.505.000	85,54
	05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	1.046.110.937	307.142.474	305.913.881	99,60	378.505.896	368.951.413	97,48
	1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.046.110.937	307.142.474	305.913.881	99,60	378.505.896	368.951.413	97,48
	01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.046.110.937	307.142.474	305.913.881	99,60	378.505.896	368.951.413	97,48
	UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	884.701.523	224.711.624	213.224.668	94,89	295.750.450	235.122.471	79,50
	02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	452.516.104	168.315.718	162.671.456	96,65	176.488.308	144.664.529	81,97
	1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	362.689.477	139.851.685	134.221.245	95,97	170.966.792	140.935.148	82,43
	01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	207.522.438	87.005.000	86.166.949	99,04	81.831.438	78.004.982	95,32
	02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	58.811.509	16.900.388	15.991.877	94,62	35.539.121	18.415.121	51,82
	03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	96.355.530	35.946.297	32.062.419	89,20	53.596.233	44.515.045	83,06

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.22 ...

NO	DINAS / UPT / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN AKHIR					
			APBD Penyempurnaan (Rp)	Realisasi APBD Penyempurnaan (%)		APBD Perubahan (Rp)	Realisasi APBD Perubahan (%)	
				4	5		6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	89.826.627	28.464.033	28.450.211	99,95	5.521.516	3.729.381	67,54
	02 Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	89.826.627	28.464.033	28.450.211	99,95	5.521.516	3.729.381	67,54
06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	242.247.629	43.162.422	37.319.728	86,46	79.847.207	54.211.107	67,89
1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	242.247.629	43.162.422	37.319.728	86,46	79.847.207	54.211.107	67,89
	02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	65.078.075	10.416.956	10.025.395	96,24	37.111.119	30.761.019	82,89
	03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	177.169.554	32.745.466	27.294.333	83,35	42.736.088	23.450.088	54,87
07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	189.937.790	13.233.484	13.233.484	100,00	39.414.935	36.246.835	91,96
1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	189.937.790	13.233.484	13.233.484	100,00	39.414.935	36.246.835	91,96
	01 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	189.937.790	13.233.484	13.233.484	100,00	39.414.935	36.246.835	91,96
UPT BALAI BENIH INDIUK HORTIKULTURA		1.323.288.921	549.404.111	546.543.372	99,48	-	-	-
02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.323.288.921	549.404.111	546.543.372	99,48	-	-	-
1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.323.288.921	549.404.111	546.543.372	99,48	-	-	-
	02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	1.323.288.921	549.404.111	546.543.372	99,48	-	-	-

Bersambung...



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Sambungan Tabel 3.22 ...

NO	DINAS / UPT / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN AWAL (Rp)	PAGU ANGGARAN AKHIR					
			APED Penyempurnaan (Rp)	Realisasi APED Penyempurnaan		APED Perubahan (Rp)	Realisasi APED Perubahan	
				(Rp)	(%)		(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UPT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTANIAN		970.353.572	-	-	-	-	-	-
07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		970.353.572	-	-	-	-	-	-
1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		495.036.856	-	-	-	-	-	-
01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN		495.036.856	-	-	-	-	-	-
1.02 Penerapan Penyuluhan Pertanian		475.316.716	-	-	-	-	-	-
02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		475.316.716	-	-	-	-	-	-



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki pagu anggaran sebesar Rp 20.596.433.610 dan terealisasi sebesar Rp 16.703.113.978 atau mencapai 81,10% dari pagu (Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana); dan
2. IKU Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura memiliki pagu anggaran sebesar Rp 3.091.425.048 dan terealisasi sebesar Rp 2.225.074.360 atau mencapai 71,98% dari pagu (Program Penyuluhan Pertanian dan Program Perizinan Usaha Pertanian).

Adapun secara program/kegiatan pendukung dari bidang maupun UPT lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam upaya mencapai sasaran program adalah:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan pagu Rp 5.311.192.149 dapat terealisasi sebesar Rp 5.159.962.712 atau mencapai 97,15%;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan pagu Rp 14.906.735.565 dapat terealisasi Rp 11.174.199.853 atau mencapai 74,96%;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana dengan pagu sebesar Rp 378.505.896 dapat terealisasi Rp 368.951.413 atau mencapai 97,48%;
4. Program Penyuluhan Pertanian dengan pagu Rp 3.011.577.841 dapat terealisasi sebesar Rp 2.170.863.253 atau mencapai 72,08%; dan
5. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan pagu Rp 79.847.207 dapat terealisasi sebesar Rp 54.211.107 atau 67,89 %.



Realisasi pelaksanaan anggaran seperti dijelaskan di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat telah cukup berhasil melaksanakan program-program strategis dengan realisasi mencapai 79,91%.



BAB IV

PENUTUP

1. Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 5 (lima) program prioritas yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.
2. Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Capaian kinerja rata-rata dari 6 indikator tujuan/sasaran strategis tahun 2021 sebesar 49,73% dari target yang ditetapkan.
 - b. Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dan capaian kinerja rata-rata (selisih antara capaian kinerja dengan penyerapan anggaran) tidak dapat diukur karena capaian kinerja di bawah 100% (49,73%). Sedangkan realisasi anggaran *corebusiness* sebesar 79,91%.
 - c. Capaian kinerja tujuan (NTP dan Laju PDRB), NTP Hortikultura melampaui target dari target sebesar 101,40 tercapai 104,87 (103,42%). Sedangkan NTP Tanaman Pangan tidak mencapai target, dari target sebesar 95,11 hanya terealisasi sebesar 94,17 (99,01%). Sementara itu untuk kinerja Laju Pertumbuhan PDRB baik Tanaman Pangan maupun Hortikultura, berdasarkan Angka Sangat Sementara yang dirilis oleh BPS tidak mencapai target. Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan sebesar -5,55% sedangkan Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura sebesar 1,92%.



- d. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, capaian kinerja NTP Tanaman Pangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021 cenderung mengalami penurunan kecuali NTP Hortikultura cenderung naik dibandingkan tahun 2020 (5,88%). Kondisi ini secara umum sebagai dampak terjadinya pandemi covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkontraksi.
 - e. Bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, capaian produksi tanaman pangan tahun 2021 sebesar 88,28% yaitu dari target produksi sebesar 1.119.520 ton hanya terealisasi sebesar 988.261 ton. Penyebab utama tidak tercapainya target kinerja produksi tanaman pangan terutama adalah menurunnya luas panen padi sebesar 3,53% dan luas panen jagung sebesar 17,8%. Ini menunjukkan indeks pertanaman padi yang masih rendah meskipun produktivitas padi menunjukkan adanya peningkatan dari 30,33 ku/ha pada tahun 2020 menjadi 31,38 ku/ha pada tahun 2021. Untuk komoditas jagung, produksi turun sebesar 16,58% disebabkan oleh turunnya luas panen sebesar 17,8%.
 - f. Capaian kinerja produksi tanaman pangan tahun 2021 cenderung menurun sebesar 4,21% jika dibandingkan dengan capaian kinerja produksi tanaman pangan tahun 2020.
 - g. Capaian kinerja rata-rata produksi hortikultura (Buah, Sayuran, dan Obat) tahun 2021 mencapai 114,95% terhadap target. Kinerja produksi tanaman buah, sayuran dan obat tahun 2021 rata-rata naik (1,76%) dibandingkan dengan tahun 2020.
3. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Barat masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan antara lain belum optimalnya pemanfaatan lahan sawah yang hanya ditanami 1 kali setahun sekitar 29,02%, kurangnya dukungan infrastruktur pengairan dan alsintan, pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan belum



optimal, belum optimalnya penerapan teknologi usaha tani sehingga produktivitas lahan pertanian terutama padi yang masih rendah.

4. Upaya telah dilakukan pada tahun 2021 untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut antara lain mengoptimalkan potensi lahan sawah untuk pertanaman padi melalui kegiatan optimalisasi lahan dan pengembangan jaringan irigasi, penyediaan alsintan pra tanam dan pasca panen, peningkatan produktivitas tanaman pangan serta berbagai kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan kelompok tani, serta merancang pembentukan koorporasi petani berbasis kawasan. Selain itu telah dilakukan kegiatan konsultasi dan penelitian terkait penyusunan rencana kawasan strategis pertanian berbasis agrowisata dan penyusunan sistem informasi manajemen bisnis usaha tani unggulan.
5. Adapun langkah-langkah dan upaya baik secara kuantitas maupun kualitas di masa datang untuk mengatasi kendala dan hambatan yang masih ada diantaranya adalah:
 - a. Inventarisasi kembali data potensi lahan sawah untuk menentukan prioritas lokasi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Meningkatkan optimalisasi lahan dan pengembangan alsintan sesuai skala prioritas dalam upaya peningkatan indeks pertanaman dan produktivitas baik tanaman pangan maupun hortikultura
 - c. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara intensif tentang penerapan teknologi usaha tani yang bersifat inovatif dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
 - d. Pemberdayaan petani melalui pembentukan kelembagaan ekonomi petanin berbasis kawasan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan



- e. Mengembangkan dan meningkatkan sistem agribisnis usaha tani unggulan baik tanaman pangan maupun hortikultura untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pontianak, Januari 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660214 199303 1 003



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran 1

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN

: DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
: 2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran Strategis)	Target Kinerja Sasaran 2021 (Perubahan)	Realisasi Kinerja 2021	Persentase Capaian Target Kinerja 2021
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Kesejahteraan Petani		Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	4,13 - 4,81	-5,55	-134,38
			Laju Pertumbuhan PDRB Hortikultura (%)	6,42 - 8,68	1,92	29,91
			NTP Tanaman Pangan dan Palawija	95,11	94,17	99,01
			NTP Hortikultura	101,40	104,87	103,42
		Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton)	1.619.100	1.562.525	96,51
			Rincian:			
			Jumlah produksi tanaman pangan (ton)	1.119.520	988.261	88,28
			- Padi	873.500	776.797	88,93
			- Jagung	246.020	211.464	85,95
			Jumlah produksi tanaman hortikultura (ton)	499.580	574.264	114,95
			- Tanaman Buah	423.650	494.321	116,68
			- Tanaman Sayuran	51.500	59.720	115,96
		- Tanaman Obat	24.430	20.223	82,78	
		Meningkatnya pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	Indeks yang diterima oleh petani tanaman pangan dan hortikultura	102,37	106,38	103,92
Rata-rata Capaian Kinerja				49,73		

Jumlah Pagu Anggaran Sasaran Strategis tahun 2021

Rp 23.687.858.658

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis tahun 2021

Rp 18.928.188.338

79,91%

Pontianak, Januari 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. FLORENTINUS ANUM, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660214 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Jalan Aliyung No 17 Telp (0561) 734017, Fax (0561) 737069 E-mail : distan@kalberprov.go.id
@Ayo Berani Channel Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Ayo Berani Channel <http://www.distan.kalberprov.go.id>
PONTIANAK

Kode Pos 78116

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Florentinus Anum, M. Si
Jabatan : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Sutarmidji, SH, M.Hum
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, November 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ir. FLORENTINUS ANUM, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1,619,100 Ton
		-Jumlah Produksi Tanaman Pangan	1,119,520 Ton
		-Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	499,580 Ton
2	Meningkatnya Pendapatan Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	Indeks yang diterima oleh Petani Tanaman Pangan	102,37

	Program	Anggaran	Keterangan
A	APBN	87.459.983.000,-	APBN
1.	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	4.193.723.000	APBN
2.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	72.050.929.000,-	APBN
3.	Program Dukungan Manajemen	4.096.705.000,-	APBN
4.	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	7.118.626.000,-	APBN
B	APBD	42.911.972.821,-	APBD
1.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.791.372.345,-	APBD
2.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.062.573.465,-	APBD
3.	Program Penyuluhan Pertanian	2.972.162.906,-	APBD
4.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	378.505.896,-	APBD
5.	Program Perizinan Usaha Pertanian	79.847.207,-	APBD
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.627.511.002,-	APBD
TOTAL		130.371.955.821,-	

Pontianak, November 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



Ir. FLORENTINUS ANUM, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660214 199303 1 003



DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
JLN. ALIANYANG NO.17 Telp. (0561) 734017 , Fax. (0561) 737069
Email : distan@kalbarprov.go.id